



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

RENCANA AKSI TAHUNAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

KABUPATEN KUTAI TIMUR 2025



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

RENCANA AKSI TAHUNAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

KABUPATEN KUTAI TIMUR 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 dapat diselesaikan dan diterbitkan. RAT merupakan dokumen perencanaan penanggulangan kemiskinan tahunan yang menjadi pedoman bagi pemangku kepentingan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan. Dokumen ini berisi penjelasan mengenai latar belakang, dasar hukum penyusunan RAT, hasil evaluasi kinerja pelaksanaan penanggulangan Kemiskinan tahun sebelumnya, kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan tahun 2024, dan Rencana Aksi Tahunan penanggulangan kemiskinan Kabupaten Kutai Timur tahun 2025.

Kami menyadari bahwa penyusunan buku ini tidak lepas dari kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat menghargai saran dan masukan konstruktif dari berbagai pihak untuk penyempurnaan publikasi ini di masa mendatang. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusinya baik dalam bentuk data, tenaga, maupun pemikiran dalam penyusunan RAT Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025, sehingga buku ini dapat diselesaikan. Semoga buku ini dapat bermanfaat sebagai perencanaan dan penganggaran pembangunan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kutai Timur dalam upaya percepatan penurunan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan salah satu tujuan pembangunan.

Sangatta, Desember 2024

[Nama Penanggung Jawab]

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum dan Kebijakan Operasional.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	2
1.3.1 Maksud.....	2
1.3.2 Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	3
1.5. Jadwal Pelaksanaan.....	3
1.6. Metode Kerja	4
BAB II HASIL EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN SEBELUMNYA	5
2.1 Kondisi Umum Kemiskinan Kabupaten Kutai Timur	5
2.2 Hasil Evaluasi Bidang Ketenagakerjaan.....	11
2.3 Hasil Evaluasi Bidang Kesehatan	13
2.4 Analisis Karakteristik Masalah Bidang Pendidikan	18
2.5 Analisis Karakteristik Masalah Bidang Infrastruktur Dasar.....	21
2.6 Evaluasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023	22
2.7 Program Keluarga Harapan (PKH).....	32
BAB III KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN BERJALAN	35
3.1 Strategi dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kutai Timur.....	35
BAB IV RENCANA AKSI TAHUNAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2025	47
4.1 Strategi dan Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025.....	47

4.2 Lokasi prioritas Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kutai Timur tahun 2025	67
---	----

BAB V PENUTUP	88
----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018-2023.....	19
Tabel 2. 2	Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018-2023	20
Tabel 2. 3	Strategi Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan 2023.....	22
Tabel 2. 4	Strategi Meningkatkan Pendapatan 2023	26
Tabel 2. 5	Strategi Mengurangi Beban Pengeluaran 2023.....	27
Tabel 2. 6	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan dan Jumlah Bantuan Per Kecamatan di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2022	32
Tabel 2. 7	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan Per Kecamatan di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2016 - 2022	33
Tabel 3. 1	Strategi Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan 2024.....	37
Tabel 3. 2	Strategi Meningkatkan Pendapatan 2024	41
Tabel 3. 3	Strategi Mengurangi Beban Pengeluaran 2024.....	42
Tabel 4. 1	Strategi Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan 2025	47
Tabel 4. 2	Strategi Meningkatkan Pendapatan 2025	54
Tabel 4. 3	Strategi Mengurangi Beban Pengeluaran 2025.....	57
Tabel 4. 4	RAT Penanggulangan Kemiskinan dari PT. KALTIM PRIMA COAL, 2025	63
Tabel 4. 5	RAT Penanggulangan Kemiskinan dari BAZNAZ Kabupaten Kutai Timur, 2025	65
Tabel 4. 6	RAT Penanggulangan Kemiskinan dari PT. TELADAN PRIMA AGRO. Tbk, 2025	66
Tabel 4. 7	Bidang Kemiskinan Ekstrem (Proporsi Desil 1 Pada Jumlah Keluarga Miskin Ekstrem)	75
Tabel 4. 8	Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Kutai Timur...76	
Tabel 4. 9	Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Kutai Timur, 2017–2024.....	6
Gambar 2. 2 Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, 2024.....	7
Gambar 2. 3 Presentase Penduduk Miskin (P0) Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur dan Nasional, 2017–2024.....	8
Gambar 2. 4 Perbandingan Persentase Kemiskinan Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, 2024.....	9
Gambar 2. 5 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015-2024.....	11
Gambar 2. 6 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kutai Timur dan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2024.....	12
Gambar 2. 7 Jumlah Penduduk Berusia 15 Tahun Keatas yang Menganggur (Pengangguran) di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017-2023	13
Gambar 2. 8 Usia Harapan Hidup (UHH) Hasil Long Form SP2020 Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2024	14
Gambar 4. 1 Bidang Kemiskinan Konsumsi (Jumlah Keluarga Miskin Ekstrem dan Jumlah Keluarga Miskin Ekstrem Desil 1).....	68
Gambar 4. 2 Bidang Kemiskinan Konsumsi (Jumlah Keluarga Miskin Ekstrem dan Jumlah Keluarga Miskin Ekstrem Penerima Bantuan BNPT/BST/PKH/Sembako)	69
Gambar 4. 3 Bidang Pendidikan (Jumlah Keluarga Miskin Ekstrem dan Jumlah Kepala Keluarga Miskin Ekstrem dengan Pendidikan ≤SMP/ sederajat)	70
Gambar 4. 4 Bidang Pendidikan (Persentase Kepala Keluarga Miskin Ekstrem yang bekerja sebagai Petani dan Wiraswasta dengan Jumlah Kepala Keluarga Miskin Ekstrem yang Bekerja).....	71
Gambar 4. 5 Bidang Infrastruktur (Jumlah Keluarga Miskin Ekstrem dengan Sumber Air Minum (Air Hujan/Air Permukaan/Air Lainnya) dan Jumlah Keluarga Miskin Ekstrem dengan Sumber Penerangan (Non-Listrik))	72

Gambar 4. 6 Bidang Ketahanan Pangan (Produksi Padi (ha), 2023 dan Jumlah Ternak (Sapi Potong,Sapi Perah, Kerbau, dan Kambing) (ekor), 2023)73

Gambar 4. 7 Bidang Kesehatan (Jumlah Fasilitas Kesehatan/Jumlah Penduduk dan Jumlah Tenaga Kesehatan (Dokter Umum)/Jumlah Penduduk)74

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah yang tidak hanya dihadapi oleh suatu negara, tetapi juga isu global yang menjadi bagian dari target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs), yang merupakan kelanjutan dari agenda Tujuan Pembangunan Milenium atau Millennium Development Goals (MDGs). TPB/SDGs berfokus pada pembangunan yang mendukung peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, serta pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat.

Konsep pengembangan TPB/SDGs di Indonesia sesuai Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dikategorikan menjadi 4 pilar yaitu: (1) Pilar Pembangunan Sosial; (2) Pilar Pembangunan Ekonomi; (3) Pilar Pembangunan Lingkungan; dan (4) Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola. Pilar Pembangunan Sosial dalam konsep TPB/SDGs sangat erat kaitannya dengan pencapaian pembangunan dalam bidang penanggulangan kemiskinan, yang mencakup tujuan (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; dan (5) Kesetaraan Gender. Kemiskinan merupakan isu global yang juga menjadi isu daerah saat ini. Sejalan dengan amanat TPB/SDGs, kemiskinan di tahun 2030 diupayakan menjadi nol (zero poverty). Berbagai upaya ditempuh guna meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat baik dari segi perekonomian maupun pemerataan pembangunan guna mengurangi jumlah penduduk miskin.

Dalam rangka memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) bertugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di wilayahnya. Untuk mendukung tugas ini, TKPKD menyusun Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025, yang sejalan dengan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022-2026, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020.

1.2. Dasar Hukum dan Kebijakan Operasional

Dasar hukum penyusunan RAT Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan penanggulangan kemiskinan yang mendelegasikan pembentukan tugas pokok dan fungsi TKPK di daerah.
- b. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2010 tentang program pembangunan yang berkeadilan sebagai arah implementasi program-program percepatan penanggulangan kemiskinan.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 2010 tentang TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengatur fungsi TKPL dalam koordinasi dan pengendalian.
- d. Keputusan Presiden Nomor 10 tahun 2011 tentang koordinasi peningkatan dan perluasan program - program rakyat.
- e. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan satu tahun ke depan.
- b. Sebagai salah satu referensi dalam penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 dan Dokumen Rencana Kerja perangkat d

- c. arah tahun 2025 berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan.
- d. Memberikan arah untuk pencapaian kinerja pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Kemiskinan permasalahan yang kompleks dan multidimensi sehingga perlu menyusun konsep antisipasi terhadap perubahan kebijakan penanggulangan kemiskinan baik nasional maupun di daerah.
- b. Mengevaluasi hasil capaian kinerja pelaksanaan penanggulangan kemiskinan tahun sebelumnya per bidang/urusan.
- c. Menyusun kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan tahun berjalan per bidang/urusan serta target keberhasilan indikator penanggulangan kemiskinan beserta lokasi prioritas program.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari Dokumen RAT Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab II Hasil Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Aksi Tahunan Tahun Sebelumnya

Bab III Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Tahun Berjalan

Bab IV Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025

BAB V Penutup

1.5. Jadwal Pelaksanaan

Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, dimulai Minggu ketiga pada bulan Oktober 2024 hingga minggu Kedua bulan Desember 2024.

1.6. Metode Kerja

- a. Perencanaan (Identifikasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan tahun sebelumnya per bidang/urusan)

Identifikasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan tahun sebelumnya per bidang/urusan. Selanjutnya mengidentifikasi kesesuaian program dengan Rencana Aksi Daerah

- b. Persiapan Rancangan Rencana Aksi Tahunan

Hal-hal yang perlu disiapkan dan dikaji adalah materi yang diperlukan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan program penanggulangan kemiskinan dan membuat rancangan yang diperlukan.

- c. Pembuatan Matriks Rencana Aksi Tahunan

Tahapan selanjutnya setelah mempersiapkan rancangan adalah membuat matriks untuk kepentingan membuat alur terstruktur dalam program penanggulangan kemiskinan.

BAB II

HASIL EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN SEBELUMNYA

2.1 Kondisi Umum Kemiskinan Kabupaten Kutai Timur

2.1.1 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Kutai Timur

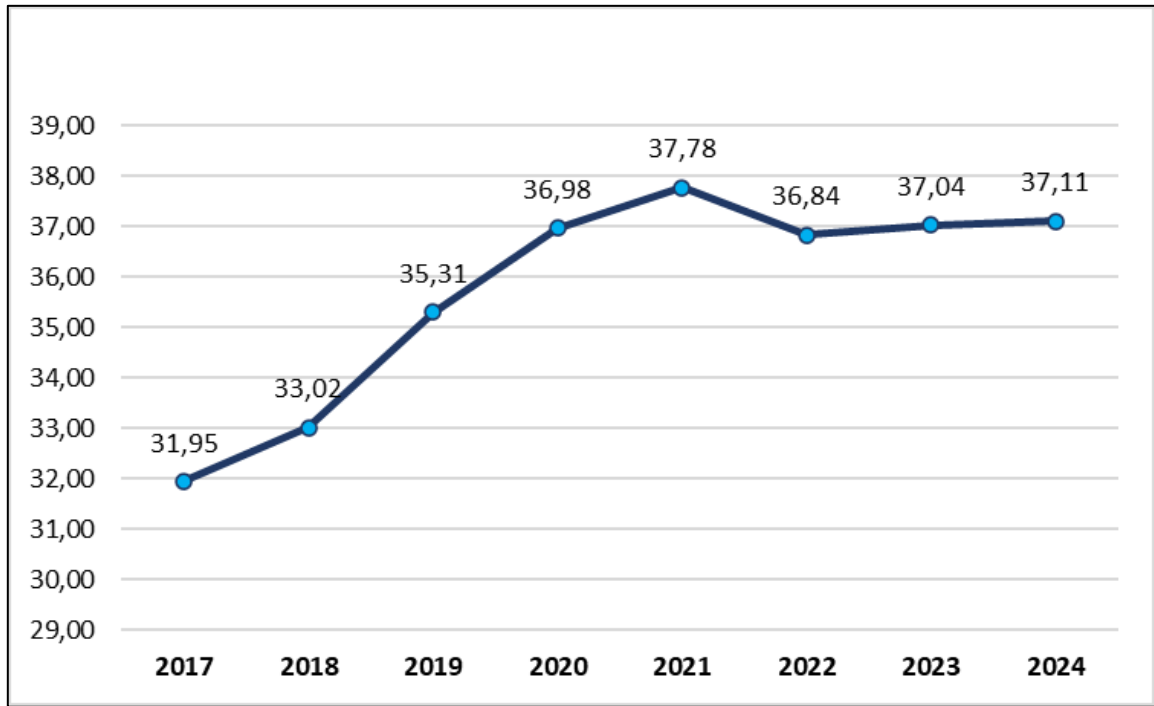
Kemiskinan menjadi masalah serius yang harus diperhatikan di berbagai wilayah. Hal ini disebabkan kemiskinan dapat menjadi permasalahan multidimensi khususnya di aspek kehidupan bermasyarakat. Jika masalah kemiskinan tidak dapat terselesaikan, maka dapat menjadi pemicu timbulnya permasalahan lainnya. Permasalahan yang dapat muncul seperti pada penurunan kesejahteraan Masyarakat, perlambatan pertumbuhan ekonomi, ketidaksetaraan social, Pendidikan dan masa depan yang kurang berkualitas, meningkatkan risiko penyakit, dan sebagainya.

Sebelum berbicara mengenai kemiskinan lebih dalam, perlu diketahui pengertian dari kemiskinan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), konsep kemiskinan merupakan kemampuan Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Melalui pendekatan tersebut, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penggunaan indicator dalam mengukur ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar Masyarakat yaitu dengan menggunakan garis kemiskinan.

Garis kemiskinan menggambarkan batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan, yang memisahkan seseorang tergolong miskin atau tidak. Dengan kata lain, kemiskinan merupakan keadaan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yaitu makanan, pakaian, rumah tinggal, pendidikan dan kesehatan. Angka Kemiskinan merupakan Indikator Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017, mendukung Tujuan ke-1 yaitu “mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun”.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kutai Timur cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2017 hingga tahun 2024. Hal ini diperparah dengan adanya pandemi covid-19 yang membuat jumlah penduduk miskin tetap mengalami peningkatan dan mencapai puncaknya dalam 7 tahun terakhir di tahun 2021 dengan jumlah 37.780 jiwa. Jika dilihat menurut *series*, tahun 2017 jumlah penduduk

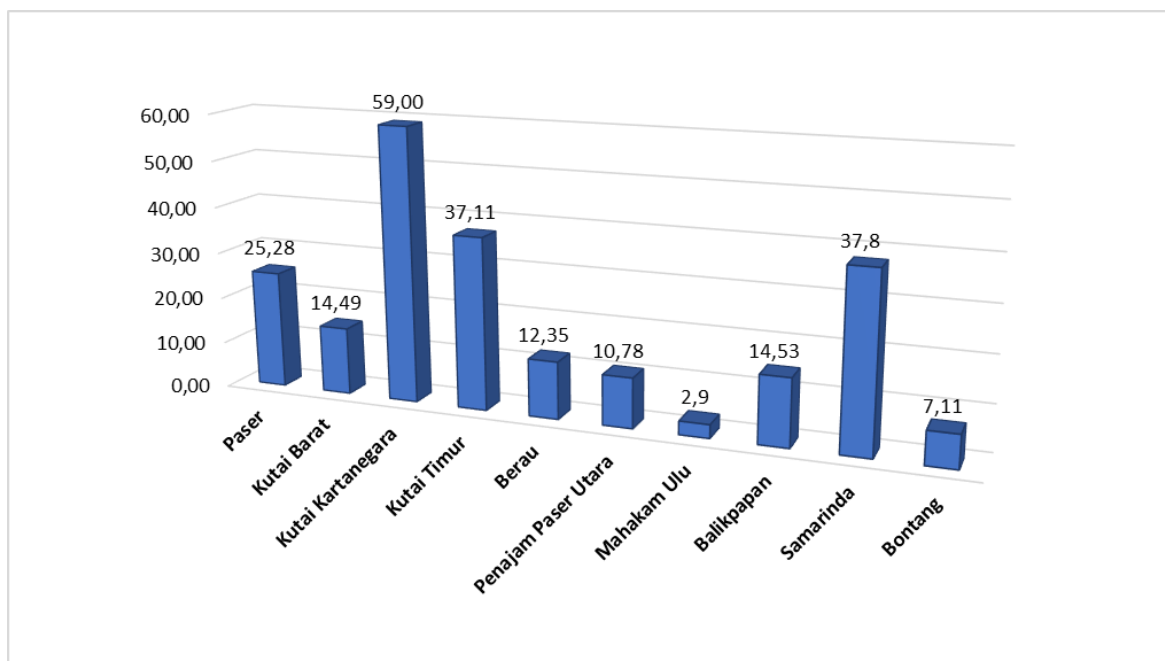
miskin di Kabupaten Kutai Timur sebanyak 31.950 jiwa dan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2021 sebanyak 37.040 atau meningkat sebesar 15,93 persen.



Gambar 2. 1 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Kutai Timur, 2017–2024

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Kutai Timur, 2024

Jika dilihat berdasarkan kemiskinan absolutnya atau jumlah penduduk miskin, di Kalimantan Timur terdapat 4 Kabupaten/kota sebagai kantong kemiskinan. Jumlah penduduk miskin terbanyak di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan jumlah sekitar 59.000 jiwa, selanjutnya yang kedua adalah Kota Samarinda dengan jumlah sekitar 37.800 jiwa, yang ketiga adalah Kabupaten Kutai Timur dengan jumlah 37.110 jiwa, yang keempat ada di Kabupaten Paser dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 2.280 jiwa.



Gambar 2. 2 Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, 2024

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Kutai Timur, 2024

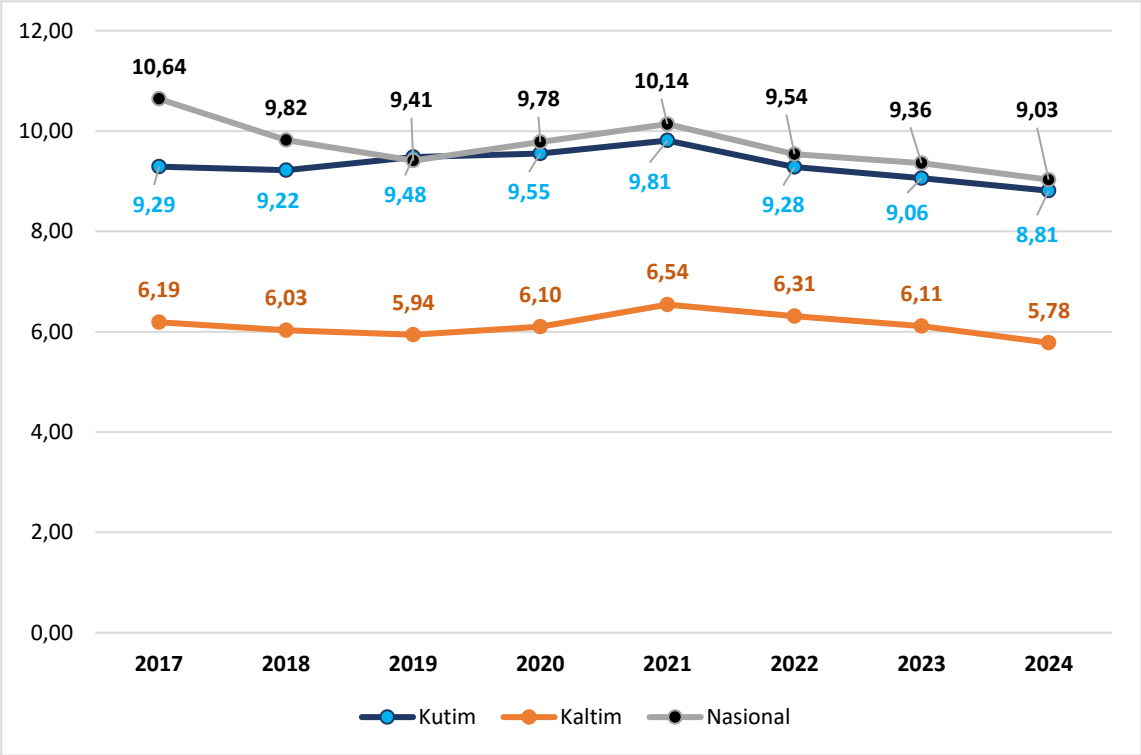
2.1.2 Persentase Penduduk Miskin (P0) Kabupaten Kutai Timur

Indikator turunan lainnya yang dapat dihasilkan ialah persentase penduduk miskin (P0). Persentase penduduk miskin merupakan ukuran yang digunakan untuk menentukan proporsi penduduk dalam suatu wilayah yang hidup di bawah garis kemiskinan. Persentase penduduk miskin tidak hanya menggambarkan aspek ekonomi, tetapi juga mencerminkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Ketika persentase penduduk miskin menurun, ini menunjukkan adanya peningkatan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Sebaliknya, jika persentase ini meningkat, ini menandakan adanya masalah dalam distribusi pendapatan, peluang ekonomi, dan layanan sosial. Oleh karena itu, pemantauan dan analisis persentase penduduk miskin menjadi sangat penting untuk mengarahkan upaya pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta memastikan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Kutai Timur selama delapan tahun terakhir (2017-2024) menunjukkan angka fluktuatif dengan kecenderungan penurunan. Pada tahun 2017 persentase penduduk miskin sebesar 9,29 persen dan pada tahun 2024 turun menjadi 8,81 persen. Jika dilihat berdasarkan Grafik 2.23, angka kemiskinan di Kabupaten Kutai Timur masih berada di atas angka

kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur yang sebesar 5,78 persen tetapi sudah di bawah angka kemiskinan nasional yang sebesar 9,03 persen pada tahun 2024.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk menurunkan angka kemiskinan melalui berbagai program strategis antara lain Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni, Padat Karya dan berbagai program yang berpihak pada pemberdayaan masyarakat miskin baik dari anggaran dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan CSR dari perusahaan yang operasional di Kutai Timur.

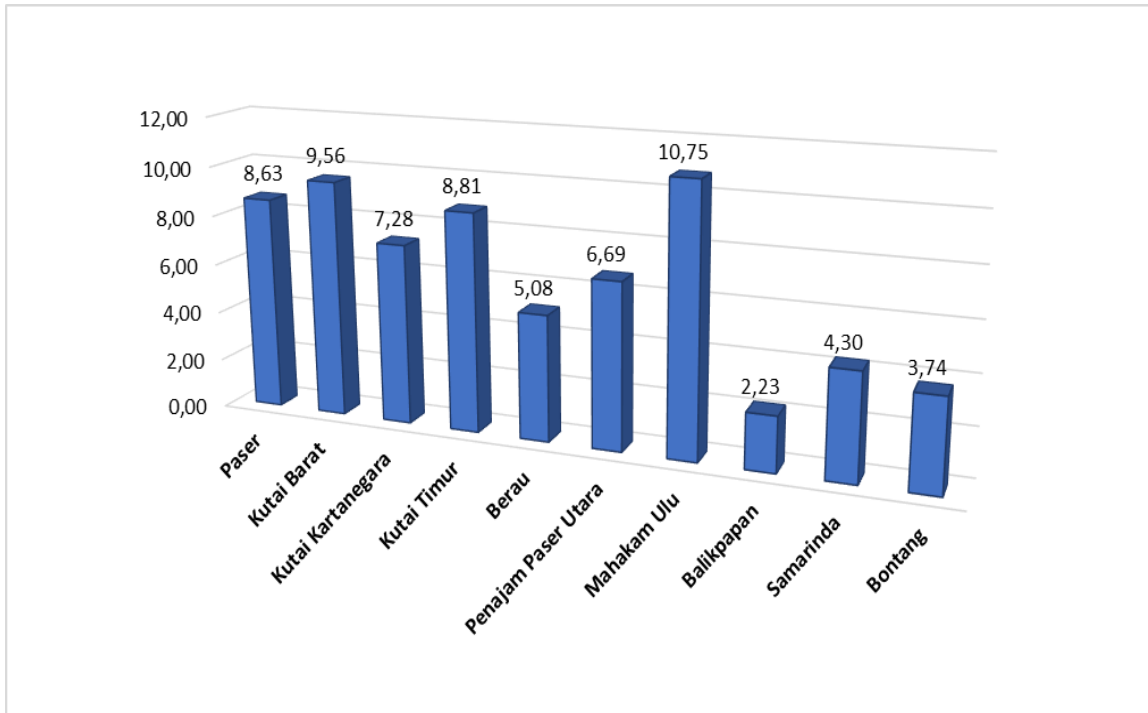


Gambar 2. 3 Presentase Penduduk Miskin (P0) Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur dan Nasional, 2017–2024

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Kutai Timur, 2024

Jika di *breakdown* lebih lanjut, persentase Kemiskinan Kabupaten Kutai Timur dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2024 berada pada urutan ke-3 se-Kalimantan Timur yaitu sebesar 8,81 persen. Sementara itu, persentase penduduk miskin kabupaten/kota terbesar di Kalimantan Timur pada tahun 2024 didapat oleh Kabupaten Mahakam Ulu dengan besaran 10,75

persen. Sedangkan untuk persentase terendah diperoleh Kota Balikpapan dengan besaran 2,23 persen.



Gambar 2. 4 Perbandingan Persentase Kemiskinan Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, 2024

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Kutai Timur, 2024

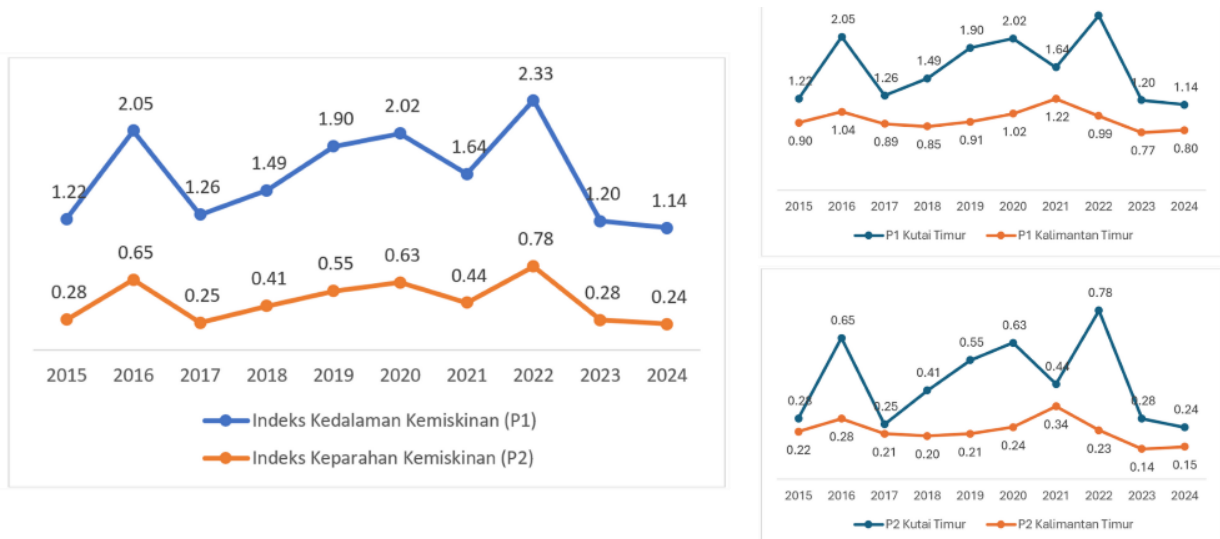
2.1.3 Tingkat Kedalaman (P1) dan Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Kutai Timur

Ketika melihat permasalahan kemiskinan tidak dapat hanya dilihat terbatas pada persoalan kemiskinan absolut, namun juga perlu dilihat pada persoalan kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif merupakan kategori kemiskinan yang ditentukan berdasarkan perbandingan relatif Tingkat kesejahteraan antar penduduk atau dengan kata lain dapat dikatakan sebagai besar rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Untuk mengetahui kesenjangan tersebut dapat digunakan Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index/P1*) dan Gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin menggunakan Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index/P2*).

Semakin tinggi nilai indeks P1, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Dalam rentang waktu 2017 – 2023, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Kutai Timur terendah terjadi pada tahun 2023 yaitu sebesar 1,20. Sedangkan tahun sebelumnya sebesar 2,33. Dengan semakin menurunnya nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Kutai Timur ini, perlu diapresiasi dalam pengendalian kemiskinan. Namun masih pekerjaan rumah yang perlu menjadi perhatian dari Pemerintah Kabupaten bahwa permasalahan di Kutai Timur tidak hanya permasalahan banyaknya orang miskin, tetapi dari sebanyak orang miskin tersebut, ternyata tiap tahun semakin dalam tingkat kemiskinannya dibandingkan batas garis kemiskinan. Artinya pemerintah kabupaten diharapkan mampu bahu membahu bersama stakeholder terkait dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kutai Timur.

Sementara itu, semakin tinggi nilai indeks P2 maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Jika semakin dalam atau tinggi ketimpangannya maka akan semakin sulit dalam pengentasan kemiskinannya. Berdasarkan grafik 2.5 dapat terlihat bahwa nilai P1 dan P2 dari Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional antara tahun 2017 – 2023 mempunyai pola yang sama. Kenaikan nilai P1 cenderung diikuti oleh kenaikan P2 ataupun sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa di Kutai Timur, selain semakin dalam masyarakat miskin terhadap garis kemiskinan, juga semakin timpang pengeluaran diantara penduduk miskinnya.

2.1.4 Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2) Kutai Timur, Kalimantan Timur dan Nasional, 2017–2024



Gambar 2.5 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015-2024

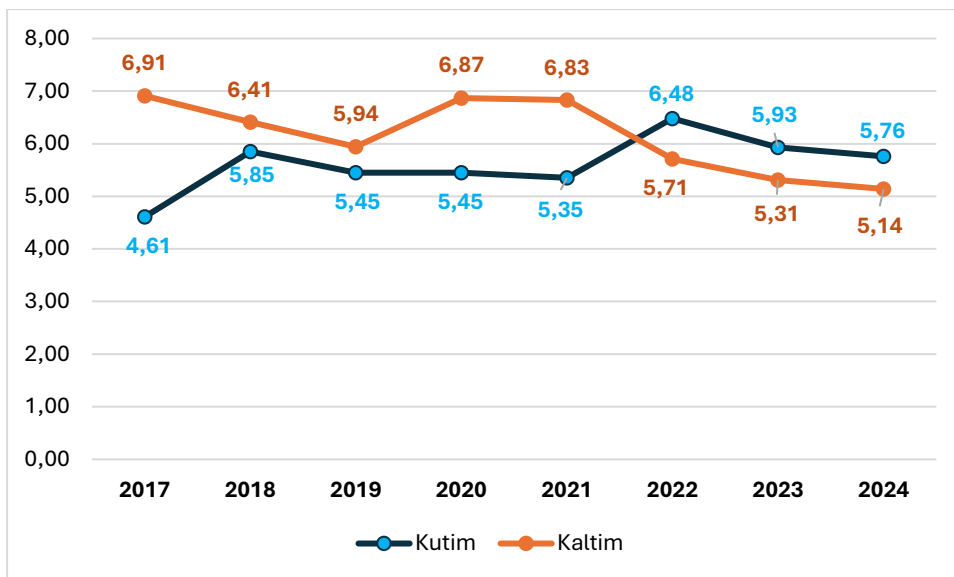
Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Kutai Timur, 2024

2.2 Hasil Evaluasi Bidang Ketenagakerjaan

2.2.1 Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran merupakan salah satu masalah utama yang selalu dihadapi setiap daerah. Jika berbicara mengenai masalah pengangguran, berarti tidak hanya berbicara tentang masalah sosial tetapi juga berbicara tentang masalah ekonomi, karena pengangguran selain menyebabkan masalah sosial juga memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah khususnya untuk daerah yang ingin mengembangkan kemandirian ekonomi seperti Kabupaten Kutai Timur. Menurut Sadono Sukirno (1994), definisi pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya atau dengan kata lain pengangguran adalah keadaan dimana orang ingin bekerja namun tidak mendapat pekerjaan. Pengangguran merupakan salah satu penyakit ekonomi yang sangat berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi. Pengangguran mengakibatkan orang tidak memiliki pendapatan dan mendorong mereka jatuh ke jurang kemiskinan. Secara umum pemerintah mengatasi pengangguran dengan mengupayakan memperluas kesempatan kerja, baik di sektor pemerintahan maupun sektor swasta.

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diukur sebagai persentase jumlah penganggur/pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja. Pengukuran indikator Tingkat Pengangguran Terbuka ini digunakan untuk mengukur sejauh mana penduduk pada angkatan kerja mampu bergabung pada pekerjaan. Dalam nilai yang besar, TPT dapat menjadi gambaran bahwa semakin banyak angkatan kerja yang tidak termanfaatkan pada aktivitas perekonomian.

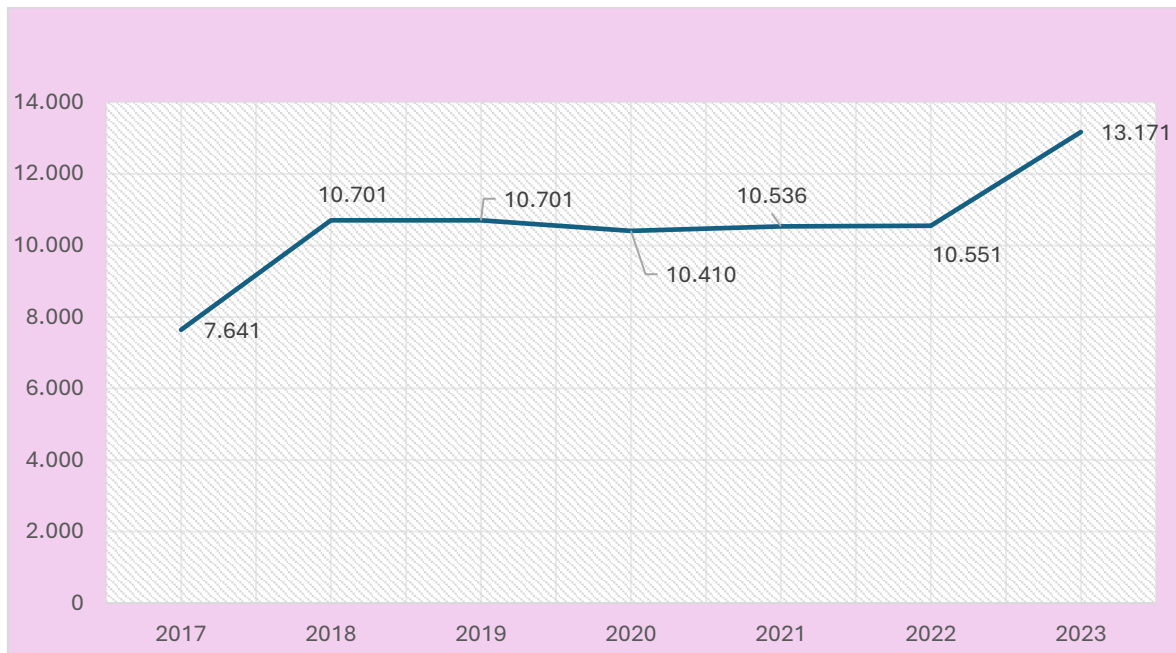


Gambar 2. 6 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kutai Timur dan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2024

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Kutai Timur, 2024

Berdasarkan gambar di atas, pada tahun 2024, TPT di Kabupaten Kutai Timur menurun sebesar 0,17 persen menjadi 5,76 persen. Nilai ini dapat diartikan bahwa di antara 100 angkatan kerja, terdapat 4 sampai 5 orang yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja (menganggur). Nilai TPT Kabupaten kutai Timur dalam tiga tahun terakhir terlihat berada di atas nilai TPT Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah Kutai Timur. Walaupun terdapat penurunan nilai TPT dalam tiga tahun terakhir namun penurunan tersebut masih belum membuat nilai TPT Kabupaten Kutai Timur menjadi di bawah nilai TPT provinsi Kalimantan Timur. Jika dilihat

berdasarkan jumlah yang menganggur, pada tahun 2021 hingga 2023 terjadi peningkatan jumlah bahkan pada tahun 2023 melonjak signifikan.



Gambar 2. 7 Jumlah Penduduk Berusia 15 Tahun Keatas yang Menganggur (Pengangguran) di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017-2023

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Kutai Timur, 2024

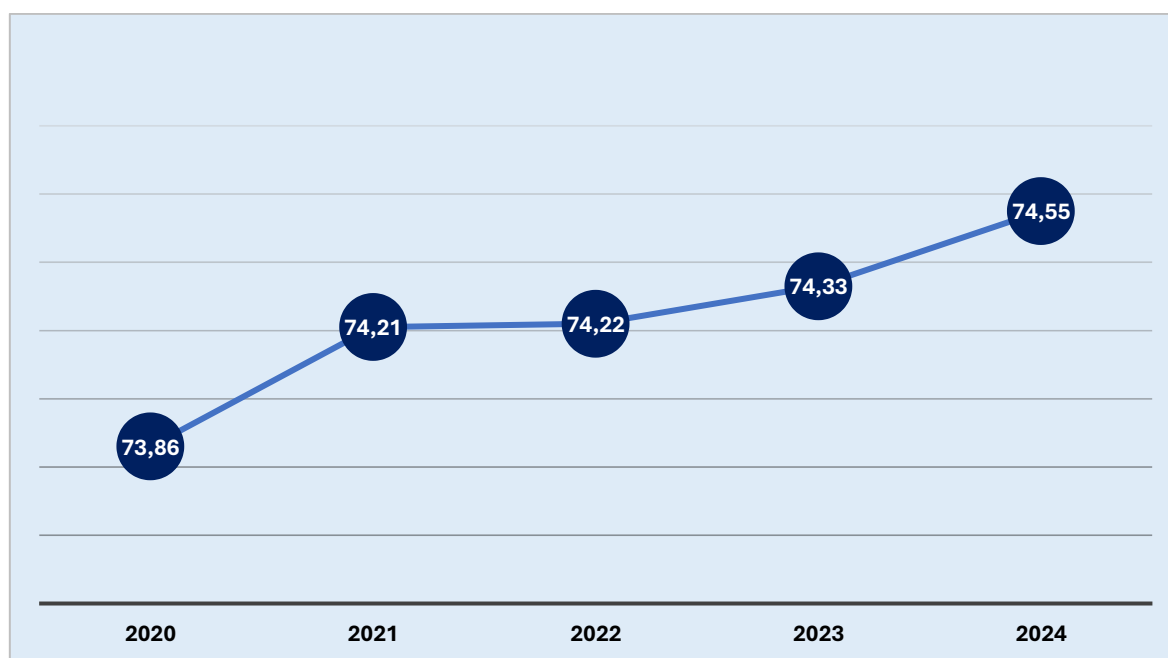
2.3 Hasil Evaluasi Bidang Kesehatan

Pembangunan kesehatan merupakan upaya pemenuhan salah satu hak dasar masyarakat untuk dapat mengakses fasilitas pelayanan kesehatan karena kesehatan merupakan hak asasi manusia. Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Selain itu, kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar setiap penduduk selain pangan, tempat tinggal, dan pendidikan karena manusia dalam keadaan sehat dapat hidup, tumbuh dan berkarya lebih baik. Keberhasilan pembangunan bidang kesehatan dapat dilihat dari indikator-indikator yang digunakan seperti Usia Harapan Hidup (UHH), Prevalensi Balita Stunting serta Perkembangan derajat kesehatan masyarakat yang dapat dilihat dari kejadian angka kematian bayi dan angka kematian ibu.

2.3.1 Usia Harapan Hidup (UHH)

Hidup lebih lama dapat menjadi salah satu indikasi tingginya derajat kesehatan di suatu daerah. Namun untuk memastikan tinggi rendahnya diperlukan sebuah indikator penilaian, salah satu indikator yang dapat digunakan dalam perencanaan program kesehatan adalah Usia Harapan Hidup (UHH). Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan indikator penyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam bidang kesehatan dimana angka tersebut dapat mengindikasikan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. UHH dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan.

UHH juga dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi UHH maka derajat kesehatan masyarakat semakin baik dan hal ini didukung oleh keberhasilan dalam pembangunan bidang kesehatan. Sebaliknya, pembangunan bidang kesehatan yang kurang berhasil berdampak pada rendahnya derajat kesehatan masyarakat sehingga UHH rendah. Di beberapa negara yang tingkat kesehatannya lebih baik, setiap individu memiliki rata-rata hidup lebih lama, dengan demikian secara ekonomis mempunyai peluang untuk memperoleh pendapatan lebih tinggi (Kumalasari, 2011).



Gambar 2. 8 Usia Harapan Hidup (UHH) Hasil Long Form SP2020 Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2024

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Kutai Timur, 2024

Jika dilihat berdasarkan Gambar di atas, UHH Kabupaten Kutai Timur dalam lima tahun berhasil meningkat. Hal ini menunjukkan keberhasilan program dan kegiatan di bidang kesehatan seperti semakin baik dan mudahnya akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan, perilaku hidup sehat oleh masyarakat dan disertai semakin membaiknya kondisi sosial ekonomi masyarakat disertai dukungan peningkatan kesehatan lingkungan. Pada tahun 2024, UHH Kabupaten Kutai Timur sebesar 74,55 tahun yang bermakna bahwa setiap bayi yang baru lahir pada tahun 2024 memiliki harapan hidup hingga mencapai usia sekitar 74 hingga 75 tahun. Jika dilihat perkembangannya dari tahun 2019, terjadi peningkatan UHH sebesar 0,93 persen dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

2.3.2 Prevalensi Balita Stunting

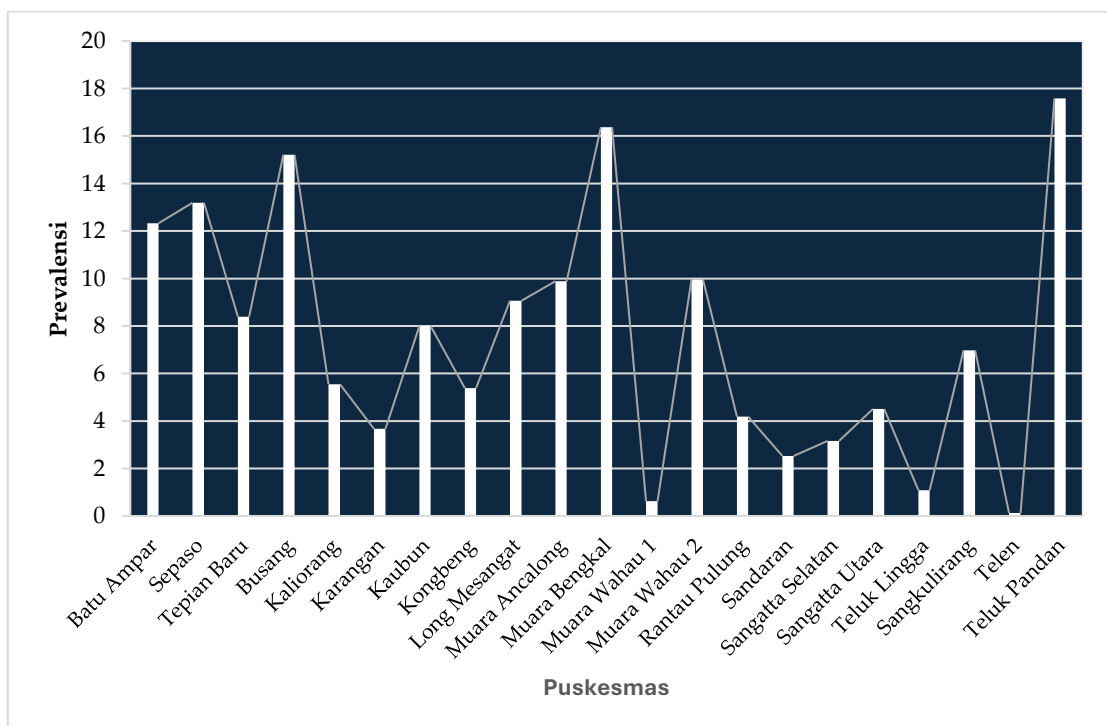
Status gizi masyarakat dapat diukur melalui beberapa indikator penting, antara lain Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), Status gizi balita, anemia gizi besi pada ibu hamil dan wanita usia subur, serta Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY). Status gizi balita merupakan salah satu indikator SDGs yang perlu mendapatkan perhatian. Kasus gizi buruk dapat diperoleh dari indikator berat badan menurut tinggi badan (BB/TB). Data tersebut diperoleh dari laporan masyarakat, kader Posyandu atau kasus-kasus yang langsung dibawa ke tempat-tempat pelayanan kesehatan yang ada di Puskesmas dan Rumah Sakit.

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat masalah gizi pada kurun waktu lama (kronis) adalah indikator stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir, akan tetapi kondisi stunting baru nampak setelah bayi berusia 2 (dua) tahun. Dengan demikian periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) seharusnya mendapat perhatian khusus karena menjadi penentu tingkat pertumbuhan fisik, kecerdasan, dan produktivitas seseorang di masa depan. Data Riskesda 2013, satu dari tiga anak Indonesia diidentifikasi stunting yang akan berpotensi menyebabkan perkembangan otak si anak kurang maksimal dan dampaknya menyebabkan turunnya produktifitas.

Stunting disebabkan oleh faktor multi dimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun anak balita. Intervensi yang paling menentukan untuk dapat mengurangi prevalensi stunting adalah intervensi yang dilakukan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dari anak

balita. Intervensi anak kerdil (Stunting) memerlukan konvergensi program/intervensi dan upaya sinergis pemerintah serta dunia usaha/masyarakat.

Untuk memastikan konvergensi program/intervensi dan sinergitas upaya intervensi stunting, maka Pemerintah Pusat menetapkan lokasi-lokasi untuk intervensi stunting di 100 kabupaten/kota dan 1.000 desa prioritas di Tahun 2018. Pemilihan lokus ini didasarkan atas kriteria jumlah dan prevalensi balita stunting, yang dibobot dengan tingkat kemiskinan provinsi (desa-kota) dan juga aksesibilitas fasilitas kesehatan. Pada saatnya nanti intervensi ini akan mencakup seluruh Kabupaten/Kota. Adapun data prevalensi balita stunting di Kabupaten Kutai Timur pada kurun waktu Tahun 2020 berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur tahun 2020 adalah sebagai berikut:



Gambar 2.9 Prevelensi Balita Stunting di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Kutai Timur, 2022

2.3.3 Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI)

Indikator selanjutnya yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan Pembangunan kesehatan adalah Angka Kematian bayi dan Angka Kematian Ibu. Angka kematian bayi (AKB) didefinisikan sebagai banyaknya bayi yang meninggal pada suatu waktu sebelum mencapai umur 1 tahun yang dinyatakan per 1000 kelahiran (UNICEF, 2020). Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan salah satu indikator yang menggambarkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu bangsa

(Kemenkes.RI, 2018). Sehingga, upaya memajukan kesejahteraan anak harus mendapat perhatian khusus agar dapat menurunkannya Angka Kematian Bayi (AKB). Sementara itu, Angka kematian ibu (AKI) merupakan jumlah kematian selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan atau cedera (WHO, 2014).

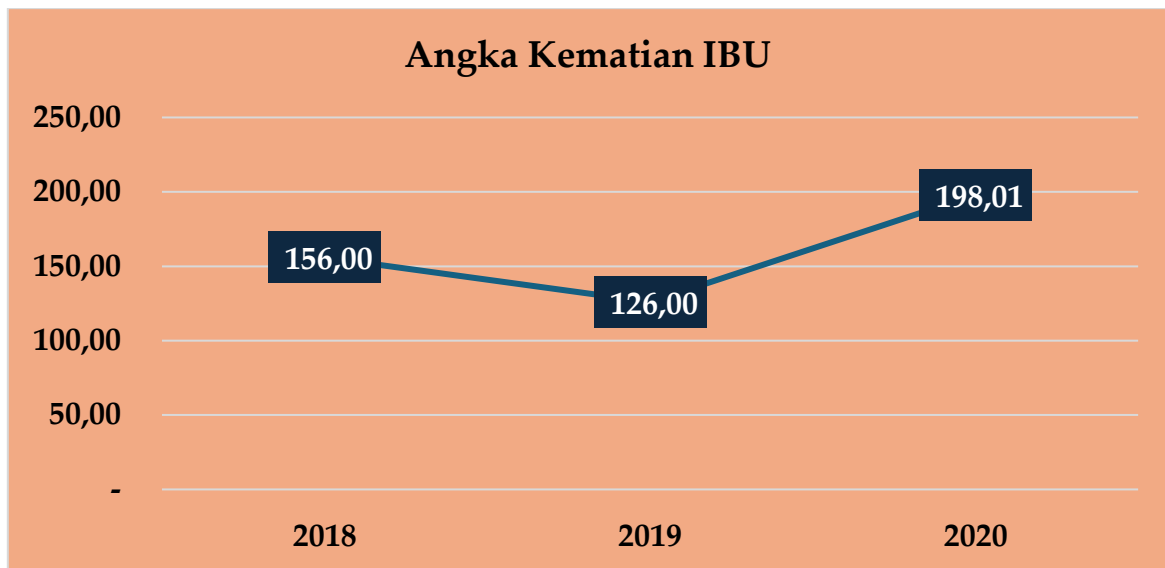


Gambar 2.10 Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016–2020

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Kutai Timur, 2021

Berdasarkan data tahun 2019 menurut World Bank angka kematian bayi di dunia mencapai 28,2 per 1000 kelahiran hidup (The World Bank, 2020). Sementara itu, Angka kelahiran hidup bayi pada tahun 2023 menurut laporan (BPS, 2024) Indonesia per 1000 kelahiran diikuti oleh angka kematian yang dialami sebesar 15. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebelum usia 1 tahun, sekitar 15 bayi mengalami kematian dari angka 1000 kelahiran. Jumlah kematian neonatal pada tahun 2021 mengalami pemurunan dari tahun 2020 yaitu sebanyak 20.154 dimana dilaporkan seluruh kematian, sebagian besar (79,1%) terjadi antara umur 0-6 hari, sedangkan 20,9% meninggal antara umur 7-28 hari (Depkes RI, 2022). Permasalahan tersebut ternyata masih terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia khususnya Kabupaten Kutai Timur. Menurut Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur, jumlah kematian bayi pada tahun 2020 ialah sebesar 6 kasus per 1.000 kelahiran hidup, turun

signifikan dibandingkan tahun 2016 yang angka kematian bayinya sebesar 12 kasus per 1.000 kelahiran hidup.



Gambar 2.11 Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018-2020

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Kutai Timur, 2021

Jika dilihat berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik, pada tahun 2023 rata-rata AKI di seluruh wilayah Indonesia masih menunjukkan angka di atas 100 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Sementara itu, jika dilihat berdasarkan kabupaten/kota, Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2020 terjadi peningkatan angka kematian Ibu hamil risiko tinggi dari 2019 yang berjumlah 126 menjadi 198 pada tahun 2020. Laporan Rutin Tahunan Program Kesehatan Ibu Dinas Kesehatan Provinsi di seluruh Indonesia juga menunjukkan penyebab kematian ibu hamil masih didominasi dengan pendarahan (32%), hipertensi dalam kehamilan (25%), dan baru diikuti oleh infeksi (5%), partus lama (5%) dan abortus (1%).

2.4 Analisis Karakteristik Masalah Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting, sehingga setiap warga negara memiliki hak mendapatkan pendidikan yang layak untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya dalam rangka menjalani hidup di era globalisasi yang penuh persaingan. Pendidikan memungkinkan untuk membuat individu menjadi lebih kompeten dan memiliki kemampuan lebih yang diperlukan dalam dunia kerja maupun untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Menurut Schultz (1981)

menyatakan bahwa faktor yang paling menentukan dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin bukanlah benda, maupun tanah untuk pertanian, melainkan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan.

Salah satu indikator yang dapat mengukur partisipasi masyarakat dalam mengikuti pendidikan dari berbagai jenjang pendidikan dan kelompok umur sekaligus dapat menjadi indikator keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan yaitu tingkat partisipasi sekolah. Tingkat partisipasi sekolah yang dapat diukur diantaranya yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Pemerintah berharap agar ketiga indikator selalu menunjukkan peningkatan setiap tahunnya pada setiap jenjang pendidikan. Hal ini dapat menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat memperoleh layanan pendidikan dasar dan menengah yang bermutu.

Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari penduduk yang masih sekolah pada umur tertentu yang dikenal dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS). Meningkatnya APS menunjukkan adanya keberhasilan di bidang pendidikan, terutama yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan. APS merupakan perbandingan antara anak usia tertentu yang masih sekolah pada tingkat apapun dengan jumlah anak usia yang bersangkutan.

Tabel 2.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018-2023

Kelompok Umur	Angka Partisipasi Sekolah (APS) (Persen)					
	Laki-laki + Perempuan					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
7 - 12	99,66	99,65	99,47	99,42	99,85	99,72
13 - 15	98,53	98,21	99,64	99,57	99,38	99,19
16 - 18	79,19	78,01	78,58	79,27	79,09	79,26
19 - 23	-	-	-	-	-	20,99

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Kutai Timur, 2024

Berdasarkan tabel 5.2, APS Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2023 untuk kelompok usia 7-12 dan 13-15 tahun di atas 95 persen, bahkan mendekati 100 persen. Untuk usia 7-12 tahun, artinya hampir seluruh anak usia 7-12 tahun bersekolah SD. Begitu pula pada kelompok usia 13-15 tahun, mencapai 96,80

persen, menggambarkan program lama wajib belajar 9 tahun telah berhasil dilaksanakan dengan baik. Kelompok usia 16-18 dan 19-24 tahun mengalami peningkatan masing-masing menjadi sebesar 80,30 dan 19,79 persen. Arti dari APS pada kelompok umur 16-18 tahun dapat dikatakan bahwa dari 100 anak usia 16-18 tahun ada 80 hingga 81 anak yang bersekolah dan sisanya tidak/belum bersekolah/putus sekolah. Rendahnya tingkat capaian APS pada jenjang tingkat sekolah lanjutan atas dan perguruan tinggi di duga karena faktor ketersediaan fasilitas dan lingkungan. Keinginan untuk melanjutkan sekolah pada jenjang lebih tinggi dari wajib belajar 12 tahun harus diimbangi dengan ketersediaan dan kemudahan akses menuju SMA dan perguruan tinggi.

Selanjutnya, tingkat partisipasi sekolah selanjutnya dapat dilihat melalui Angka Partisipasi Murni (APM). Pengertian dari Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah bersangkutan. APM digunakan untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu (usia sekolah sesuai dengan jenjang pendidikannya). APM akan mencapai nilai 100, jika seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu sesuai dengan jenjang pendidikannya.

Tabel 2.2 Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018-2023

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) (Persen)					
	Laki-laki + Perempuan					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
SD	96,98	97,41	97,75	97,2	97,61	97,58
SMP	75,01	73,6	73,99	73,63	74,29	75,82
SMA	69,8	70,3	70,04	71,3	71,25	69,17
Perguruan Tinggi	-	-	-	-	-	10,27

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Kutai Timur, 2024

Berdasarkan gambar di atas Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Kutai Timur tahun 2023, pada jenjang pendidikan SD sebesar 99,03 persen, artinya 99 dari 100 penduduk usia 7-12 tahun (usia SD) Kabupaten Kutai Timur tahun 2023 telah bersekolah tepat waktu pada jenjang SD. Dengan kata lain hampir seluruh penduduk usia sekolah SD bersekolah tepat waktu. Selain itu juga terlihat pada jenjang SD terdapat 6 hingga 7 penduduk dari 100 penduduk usia 7-12 tahun yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah. Nilai APM untuk tiap jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, dan PT, masing-masing nilainya

adalah 99,03; 79,38; 71,56; dan 11,27 persen. Namun, trend Angka Partisipasi Murni (APM) cenderung menurun saat meningkatnya jenjang pendidikannya dimana ini menjelaskan bahwa daya serap penduduk untuk bersekolah tepat waktu semakin kecil ketika semakin tinggi jenjang pendidikannya.

2.5 Analisis Karakteristik Masalah Bidang Infrastruktur Dasar

Sarana dan prasarana lingkungan perumahan dan permukiman yang nyaman, aman, sehat, berwawasan lingkungan di Kabupaten Kutai Timur didukung dengan tersedianya air bersih yang berkelanjutan, energi yang berkelanjutan, dan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Air bersih yang berkelanjutan dicapai dengan meningkatkan efisiensi pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya air, konservasi sumberdaya air, dan cakupan akses air bersih. Selain memperhatikan air bersih, sarana prasarana perumahan dan permukiman juga memperhatikan energi yang digunakan yaitu dengan energi yang berkelanjutan. Energi yang berkelanjutan merupakan energi yang efisien dan ramah lingkungan. Upaya yang bisa dilakukan dengan menurunkan penggunaan energi tak terbarukan, atau pemanfaatan energi alternatif yang terbarukan (sinar matahari, aliran air, panas bumi, pasang surut laut). Hal selanjutnya yang menjadi perhatian adalah sampah. Pengelolaan sampah yang berkelanjutan berprinsip pada 3R, yakni mengurangi sampah (reduce), meningkatkan nilai tambah sampah (reuse), dan mengembangkan proses daur ulang sampah (recycle). Capaian Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2022 dapat dijelaskan dengan beberapa indikator sebagaimana pada tabel berikut:

Berdasarkan tabel di atas, secara umum capaian kinerja urusan perumahan dan kawasan permukiman mengalami kenaikan setiap tahunnya. Seperti halnya air bersih yang berkelanjutan dari 47,42% di tahun 2020 menjadi 47,57% di tahun 2021, dan naik kembali secara signifikan di tahun 2022 menjadi 53,53%. Untuk energi yang berkelanjutan yaitu rasio elektrifikasi pada tahun 2020 mencapai 85% naik secara signifikan di tahun 2021 menjadi 87%, dan naik kembali di tahun 2022 menjadi 90%. Sedangkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan belum dilakukan penghitungan. Air bersih merupakan salah satu kebutuhan dasar setiap penduduk. Air bersih diperlukan untuk kegiatan sehari-hari baik mandi, mencuci, memasak, minum. Air bersih tidak hanya digunakan untuk keperluan rumah tangga tetapi berbagai macam aktivitas seperti industri, perdagangan, jasa, perkantoran,

pertanian, perikanan, peternakan, pariwisata, dan kesehatan. Ketersediaan air bersih yang memadai merupakan salah satu potensi untuk menarik investasi di daerah. Pada dasarnya kebutuhan air bersih penduduk Kabupaten Kutai Timur sebagian besar masih mengandalkan air Ledeng. Pada tahun 2022 sebesar 43,71% jumlah penduduk yang menggunakan air bersih untuk kebutuhan mandi/cuci dan lain lain menggunakan air ledeng. Sebanyak 13,46% kebutuhan air bersihnya berasal dari sumur/mata air terlindung dan hanya 6,92% berasal dari sumur/mata air tidak terlindung. Sebanyak 10,30% menggunakan air bersih yang berasal dari sumur bor/pompa. Tetapi masih terdapat 25,61% yang kebutuhan air bersihnya masih berasal dari Lainnya termasuk air permukaan (sungai, danau, waduk, kolam, irigasi), air hujan, dll.

2.6 Evaluasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023

Tabel 2.3 Strategi Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan 2023

No	Perangkat Daerah	Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi Pagu	Capaian Realisasi Pagu (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR)		14.091.503.000	0	~
		Pembangunan Bendung Irigasi	11.591.503.000	0	~
		Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak	2.500.000.000	0	~
2.	DINAS PENDIDIKAN (DISDIK)		334.561.748.440	240.362.486.074	71,84
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	106.076.658.700	67.722.271.005	63,84
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	80.244.010.000	66.342.550.481	82,68
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	22.563.329.740	10.846.600.990	48,07

No	Perangkat Daerah	Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi Pagu	Capaian Realisasi Pagu (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	68.395.000.000	43.893.542.231	64,18
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	33.171.750.000	29.791.933.715	89,81
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	10.216.000.000	9.416.089.508	92,17
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	800.000.000	531.546.671	66,44
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	13.095.000.000	11.817.951.473	90,25
3.	DINAS PERHUBUNGAN (DISHUB)		71.885.000.000	26.538.694.288	36,92
		Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	70.000.000.000	24.996.537.623	35,71
		Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	1.425.000.000	1.122.955.384	78,80
		Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	460.000.000	419.201.281	91,13
4.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN (DISPERKIM)		1.131.028.188.204	989.433.463.233	87,48
		Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	2.400.000.000	197.704.666	8,24
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1.600.000.000	0	~

No	Perangkat Daerah	Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi Pagu	Capaian Realisasi Pagu (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	465.690.828.204	434.825.452.333	93,37
		Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	3.400.000.000	3.313.341.000	97,45
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.500.000.000	1.147.253.000	76,48
		Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	10.800.000.000	10.154.534.974	94,02
		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	645.637.360.000	539.795.177.260	83,61
5.	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN (DTPHP)		40.318.065.696	35.073.278.906	86,99
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	800.000.000	758.014.435	94,75
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	31.546.065.696	27.888.120.882	88,40
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	7.972.000.000	6.427.143.589	80,62

No	Perangkat Daerah	Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi Pagu	Capaian Realisasi Pagu (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.	DINAS KETAHANAN PANGAN (DISKEPANG)		420.000.000	0	~
		Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	220.000.000	0	~
		Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	0	~
7.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (DISNAKERTRANS)		30.318.110.000	0	~
		Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	30.318.110.000	0	~
TOTAL			1.622.622.615.340	1.291.407.922.501	79,59

Tabel 2.4 Strategi Meningkatkan Pendapatan 2023

No	Perangkat Daerah	Program Kegiatan	Pagu	Realisasi Pagu	Capaian Realisasi Pagu (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH (DISKOP)		3.211.858.357	3.156.478.365	98,28
		Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	3.211.858.357	3.156.478.365	98,28
2.	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN (DTPHP)		8.597.587.454	8.070.400.003	93,87
		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	7.509.587.454	7.150.843.428	95,22
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	1.088.000.000	919.556.575	84,52
3.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (DISNAKERTRANS)		16.630.844.833	16.143.855.710	97,07
		Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	250.000.000	188.932.949	75,57
		Perluasan Kesempatan Kerja	4.130.844.833	3.913.429.271	94,74
		Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	12.250.000.000	12.041.493.490	98,30
TOTAL			28.440.290.644	27.370.734.078	96,24

Tabel 2.5 Strategi Mengurangi Beban Pengeluaran 2023

No	Perangkat Daerah	Program Kegiatan	Pagu	Realisasi Pagu	Capaian Realisasi Pagu (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	DINAS SOSIAL (DINSOS)		3.803.202.400	3.029.450.096	79,65
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / kota	1.715.098.150	1.610.746.297	93,92
		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota (Verifikasi Data DTKS)	1.100.000.000	1.048.048.627	95,28
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	834.901.850	251.097.948	30,08
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	123.452.400	89.821.400	72,76
		Penyediaan Permakanan	29.750.000	29.735.824	99,35
2.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)		137.542.900	39.360.000	28,62
		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	53.716.700	22.203.500	41,52
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	83.826.200	17.056.500	20,35
3.	DINAS KESEHATAN (DINKES)		89.944.846.112	83.264.251.215	92,57
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	39.607.764.671	37.128.146.780	93,74
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	800.000.000	768.082.253	96,01
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	2.110.000.000	2.054.907.846	97,39

No	Perangkat Daerah	Program Kegiatan	Pagu	Realisasi Pagu	Capaian Realisasi Pagu (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	7.027.350.000	6.811.445.409	96,93
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	491.191.200	422.829.991	86,08
		Operasional Pelayanan Puskesmas	10.500.000.000	9.578.048.225	91,22
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2.008.808.800	1.894.491.617	94,31
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	698.000.000	621.426.275	89,03
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1.400.000.000	1.309.412.980	93,53
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	1.450.000.000	1.411.058.018	97,31
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	330.000.000	308.548.271	93,50
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	1.165.165.000	1.085.077.608	93,13
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	200.000.000	199.318.390	99,66
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3.004.243.441	2.209.843.284	73,56

No	Perangkat Daerah	Program Kegiatan	Pagu	Realisasi Pagu	Capaian Realisasi Pagu (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	3.170.000.000	3.152.302.271	99,44
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	9.096.550.000	8.561.370.852	94,12
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	375.000.000	84.335.154	22,49
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	320.000.000	264.224.652	82,57
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	6.190.773.000	5.399.381.339	87,22
4.	DINAS PENDIDIKAN (DISDIK)		166.020.396.245	114.179.441.496	68,77
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	56.392.406.044	24.846.183.968	44,06
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	15.772.500.000	15.520.068.584	98,40
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	4.550.000.000	4.546.253.944	99,92
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	22.826.399.201	10.245.049.123	44,88
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	51.482.951.000	51.137.416.008	99,33

No	Perangkat Daerah	Program Kegiatan	Pagu	Realisasi Pagu	Capaian Realisasi Pagu (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	1.000.000.000	990.234.655	99,02
		Pengelolaan Dana BOP PAUD	10.008.520.000	4.344.200.100	43,41
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal / Kesetaraan	3.037.620.000	1.777.261.200	58,51
		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	950.000.000	772.773.914	81,34
5.	DINAS PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN (DISPERINDAG)		7.330.000.000	7.323.532.860	99,91
		Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	7.330.000.000	7.323.532.860	99,91
6.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (DISNAKERTRANS)		453.600.000	453.600.000	100,00
		Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	453.600.000	453.600.000	100,00
7.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DPPKB)		1.258.800.000	962.717.706	76,48
		Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon	528.000.000	470.900.000	89,19

No	Perangkat Daerah	Program Kegiatan	Pagu	Realisasi Pagu	Capaian Realisasi Pagu (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)			
		Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	580.800.000	347.680.000	59,86
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	150.000.000	144.137.706	96,09
TOTAL			268.948.387.657	209.252.353.373	77,80

2.7 Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program perlindungan sosial melalui pemberian bantuan tunai bersyarat atau secara internasional dikenal dengan nama Conditional Cash Transfer Program. Tujuan PKH adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin. Tujuan ini berkaitan langsung dengan upaya mempercepat pencapaian target **zero poor** pada Sustainable Development Goals (SDGs).

Adapun sasaran PKH adalah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memiliki ibu hamil/nifas/menyusui, dan memiliki anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, dan/atau memiliki anak usia SD dan/atau SMP dan/atau anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar. Dikatakan bersyarat karena penerima manfaat PKH akan menerima bantuan apabila menyekolahkan anaknya dengan tingkat kehadiran tertentu, memeriksakan kesehatan bagi ibu hamil dan balita dan/atau memperhatikan kecukupan gizi dan pola hidup sehat anak dan ibu hamil.

Program Keluarga Harapan yang ada di Kabupaten Kutai Timur tahun 2022 sudah mencakup keluarga yang tercakup di 18 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Sedangkan jumlah Keluarga Penerima Manfaat di tahun 2022 adalah sebesar 7.858 KPM. Adapun data disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.6 Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan dan Jumlah Bantuan Per Kecamatan di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2022

KECAMATAN	KPM	JUMLAH BANTUAN
(1)	(2)	(3)
BATU AMPAR	492	349.775.000
BENGALON	656	462.650.000
BUSANG	304	222.550.000
KALIORANG	328	243.200.000
KARANGAN	71	49.550.000
KAUBUN	220	162.975.000
kongbeng	452	335.725.000

KECAMATAN	KPM	JUMLAH BANTUAN
(1)	(2)	(3)
LONG MESANGAT	419	299.450.000
MUARA ANCALONG	874	601.575.000
MUARA BENGKAL	498	337.850.000
MUARA WAHAU	318	219.800.000
RANTAU PULUNG	483	339.125.000
SANDARAN	293	211.250.000
SANGATTA SELATAN	706	518.175.000
SANGATTA UTARA	755	536.575.000
SANGKULIRANG	214	155.175.000
TELEN	284	203.950.000
TELUK PANDAN	491	358.100.000
Grand Total	7858	5.607.450.000

Tabel 2.7 Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan Per Kecamatan di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2016 - 2022

KECAMATAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
BATU AMPAR	57	203	481	468	588	618	492
BENGALON	295	451	948	886	967	825	656
BUSANG	139	258	440	381	447	373	304
KALIORANG	73	210	288	260	234	374	328
KARANGAN	85	85	94	91	75	79	71
KAUBUN	117	263	409	348	315	299	220
KONGBENG	93	222	329	315	331	493	452
LONG MESANGAT	151	268	489	386	508	528	419
MUARA ANCALONG	332	534	1.144	1.085	1.291	1.101	874

MUARA BENGKAL	190	283	619	598	659	724	498
MUARA WAHAU	60	163	297	274	311	367	318
RANTAU PULUNG	119	244	535	516	552	559	483
SANDARAN	26	222	474	453	326	341	293
SANGATTA SELATAN	346	492	741	682	738	786	706
SANGATTA UTARA	301	139	745	643	751	909	755
SANGKULIRANG	85	373	186	177	205	255	214
TELEN	223	262	311	299	329	322	284
TELUK PANDAN	51	219	714	638	595	656	491
TOTAL	2.743	4.891	9.244	8.500	9.222	9.609	7.858

BAB III

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN BERJALAN

3.1 Strategi dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kutai Timur

Pembangunan di Kabupaten Kutai Timur tahun 2024 diarahkan untuk menjabarkan dan melaksanakan sasaran setiap misi pembangunan Kutai Timur periode 2021-2026. Pencapaian target sasaran pembangunan diindikasikan dengan sejumlah indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk tingkat kemiskinan. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu penggerak perekonomian di Kabupaten Kutai Timur dan tidak dipungkiri kehadirannya merupakan salah satu penopang perekonomian Nasional. UMKM terbukti merupakan pelaku usaha yang cukup mandiri, kukuh, fleksibel yang sudah cukup teruji terutama di saat pandemi Covid-19. Mereka mampu tetap eksis dan bahkan berkembang disaat sebagian besar sektor mengalami kelesuan. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berupaya mendorong pelaku UMKM agar naik kelas dan semakin berkembang yang diiringi dengan peningkatan produktivitas. Permasalahan umum yang dihadapi UMKM sulitnya naik kelas. Kesulitan naik kelas mengakibatkan mereka sulit berkembang, cenderung stagnan dan usahanya hanya untuk bertahan saja. Beberapa permasalahan yang menjadi penyebab UMKM naik kelas diantaranya belum tersedianya satu pusat data UMKM, akses yang terbatas dalam pembiayaan dan akses pasar. Dengan dibangunnya satu pusat data UMKM akan memudahkan mengintegrasikan ekosistem yang ada. Tata niaga sektor pertanian dan perikanan di Kabupaten Kutai Timur yang inklusif diarahkan pada peningkatan daya saing produk pertanian, peternakan, dan perikanan serta kesejahteraan petani, peternak, pembudidaya ikan dan nelayan dengan adanya kemudahan perizinan. Pada sektor perikanan, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mendorong nelayan untuk memanfaatkan teknologi dalam proses pelelangan ikan secara daring sehingga produktivitas dan penghasilan nelayan dapat meningkat.

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mendorong investasi pada pusat bisnis, bidang pariwisata, bidang pertanian dan perikanan melalui konsep lelang investasi dengan menyediakan lahan untuk dikerjasamakan serta kemudahan investasi bagi para investor. Investasi yang dikembangkan dilaksanakan dengan memadukan korporasi dengan kekuatan rakyat sehingga diharapkan perekonomian dapat

tumbuh. Salah satu amanah pembangunan nasional adalah memajukan kesejahteraan umum untuk memastikan bahwa dampak pembangunan dirasakan oleh seluruh masyarakat. Amanah fundamental ini menjadi tujuan dari proses pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Kutai Timur. Dalam proses kolaborasi yang dilakukan antara pemerintah, warga dan sektor privat (Public Private Partnership), pemerintah Kabupaten Kutai Timur berusaha membuka seluas-luasnya lapangan kerja dan menciptakan wirausahawan baru yang memperhatikan konektivitas wilayah. Dengan prinsip keterhubungan wilayah, maka perluasan dunia kerja sejalan dengan pembukaan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru (aglomerasi) yang terhubung dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang sudah ada. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mendorong pemberdayaan ekonomi pada seluruh masyarakat tak terkecuali pesantren, sehingga pesantren bisa berdaya secara ekonomi. Upaya yang dilakukan adalah memberikan stimulus infrastruktur agar pesantren lebih layak, mendorong santri agar terhubung dengan pendidikan formal, mengikutsertakan santri agar memiliki pengetahuan dan keterampilan ekonomi melalui Balai Lapangan Kerja, dan memberikan reward kepada santri berprestasi, sehingga pada akhirnya pesantren dapat menjadi penopang pembangunan manusia dan dapat menumbuhkan perekonomian. Untuk itu diperlukan strategi untuk meningkatkan percepatan penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial yaitu sebagai berikut :

1. Penguatan sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan antar pusat, daerah dan desa dengan lokasi dan sasaran tertentu (By Name By Address).
2. Peningkatan akses masyarakat terhadap pekerjaan yang layak.
3. Peningkatan ketahanan masyarakat melalui pemberian jaminan sosial.
4. Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap lembaga keuangan.

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat, terutama pada masa Pandemi Covid, yang seperti diketahui bersama bahwasanya akibat dari Pandemi ini terutama karena kebijakan PSBB dan PPKM, secara signifikan menurunkan aktifitas perekonomian masyarakat dan mengakibatkan menurunnya daya beli sehingga meningkatkan angka pengangguran dan tingkat kemiskinan. Adapun permasalahan-pemmasalahan yang terjadi antara lain :

1. Masih belum pulihnya ekonomi Nasional dan Daerah pada tahun 2021.

2. Belum pulihnya usaha informal serta masih belum optimalnya pendataan sektor informal.
3. Masih terdapat inclusion error dan exclusion error pada data masyarakat miskin - Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.
4. Masih terdapat masyarakat miskin dalam DTKS yang belum memiliki identitas kependudukan (NIK), NIK Salah, NIK Ganda, dan lain-lain.
5. Potensi peningkatan jumlah penduduk miskin sebagai dampak ekonomi akibat Covid19.
6. Bertambahnya jumlah pengangguran terbuka sebagai dampak pandemi Covid-19.
7. Verifikasi dan validasi DTKS belum berjalan dengan baik.
8. Belum semua masyarakat miskin yang masuk data masyarakat miskin DTKS mendapatkan program.

Penanggulangan kemiskinan tetap menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan di Kutai Timur, dan seyogyanya upaya penanggulangannya harus bersifat lintas sektor dan lintas program berkolaborasi lintas pemerintahan. Selanjutnya dapat disampaikan Program/Kegiatan sampai Sub Kegiatan Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Strategi Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan 2024

No	Perangkat Daerah	Program/Kegiatan	Pagu	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR)		59.189.729.000	
		Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa.	200.000.000	100 Desa
		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan.	36.289.729.000	10 Liter/Detik
		Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan.	10.000.000.000	500 km
		Pembangunan Bendung Irigasi	8.750.000.000	5 Bendung
		Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	350.000.000	100 km

No	Perangkat Daerah	Program/Kegiatan	Pagu	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	2.200.000.000	150 km
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	1.400.000.000	10 Dokumen
2.	DINAS PENDIDIKAN (DISDIK)		392.526.963.250	
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	73.050.000.000	106 Unit
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	218.804.168.750	92 Ruang
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.026.310.600	5 Unit
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	38.540.570.900	10 Ruang
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	38.505.250.000	76 Unit
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	4.020.000.000	17 Ruang
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	50.000.000	1 Unit
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	17.530.663.000	11 Ruang
3.	DINAS PERHUBUNGAN (DISHUB)		60.660.000.000	
		Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	50.000.000.000	2 Unit
		Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	10.260.000.000	10 Unit
		Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	400.000.000	3 Unit
4.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN (DISPERKIM)		1.027.919.000.000	

No	Perangkat Daerah	Program/Kegiatan	Pagu	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	300.000.000	2 Dokumen
		Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	100.000.000	1 Dokumen
		Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	500.000.000	1 Dokumen
		Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	6.000.000.000	400 Unit
		Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	14.000.000.000	100 Unit
		Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.000.000.000	40 Unit
		Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni	30.000.000.000	100 Unit
		Kerja Sama Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	306.300.000.000	1 Dokumen
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	500.000.000	1 Laporan
		Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	1.000.000.000	5 Dokumen
		Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	10.000.000.000	3 ha
		Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	11.000.000.000	18 Dokumen
		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	647.219.000.000	18 Lokasi
5.	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN (DTPHP)		28.900.000.000	

No	Perangkat Daerah	Program/Kegiatan	Pagu	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	200.000.000	1 Unit
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	12.100.000.000	59 Unit
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	2.400.000.000	12 Unit
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	1.600.000.000	8 Unit
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	12.600.000.000	68 Unit
6.	DINAS KETAHANAN PANGAN (DISKEPANG)		450.000.000	
		Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	200.000.000	1 Dokumen
		Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000	1 Dokumen
7.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (DISNAKERTRANS)		44.585.000.000	
		Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	44.585.000.000	20 Satuan Pemukiman
TOTAL			1.614.230.692.250	

Tabel 3.2 Strategi Meningkatkan Pendapatan 2024

No	Perangkat Daerah	Program Kegiatan	Pagu	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	DINAS SOSIAL (DINSOS)		300.000.000	
		Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT (Komunitas Adat Terpencil)	300.000.000	72 Keluarga
2.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH (DISKOP)		3.500.000.000	
		Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	3.500.000.000	500 Unit Usaha
3.	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN (DTPHP)		5.388.000.000	
		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	4.300.000.000	1 Laporan
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	1.088.000.000	359 Unit
4.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (DISNAKERTRANS)		8.330.000.000	
		Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	200.000.000	50 KK
		Perluasan Kesempatan Kerja	1.600.000.000	1000 Orang
		Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	6.530.000.000	1000 Orang
TOTAL			17.518.000.000	

Tabel 3.3 Strategi Mengurangi Beban Pengeluaran 2024

No	Perangkat Daerah	Program Kegiatan	Pagu	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	DINAS SOSIAL (DINSOS)		8.880.000.000	
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / kota	200.000.000	13.000 Keluarga
		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota (Verifikasi Data DTKS)	650.000.000	121.198 orang
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1.000.000.000	160 Keluarga
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	180.000.000	50 Orang
		Penyediaan Permakanan	500.000.000	100 Orang
		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	3.500.000.000	278 Orang
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1.000.000.000	200 Orang
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	900.000.000	9 Orang
		Penyediaan Sandang	150.000.000	100 Orang
		Penyediaan Alat Bantu	250.000.000	25 Orang
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	150.000.000	100 Orang
		Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	100.000.000	50 Orang

No	Perangkat Daerah	Program Kegiatan	Pagu	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	100.000.000	30 Orang
		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	100.000.000	100 Orang
		Pemberian Layanan Kedaruratan	100.000.000	50 Orang
2.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)		600.000.000	
		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota"	100.000.000	20 Orang
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota"	500.000.000	200 Orang
3.	DINAS KESEHATAN (DINKES)		67.251.390.391	
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	32.812.768.525	1 Dokumen
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1.990.727.724	7.489 Orang
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	700.000.000	35.077 Orang
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	5.695.000.000	1 Dokumen
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.050.000.000	8.235 Orang
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	600.000.000	7.860 Orang
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	400.000.000	288.137 Orang
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1.300.000.000	64.985 Orang
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	1.200.000.000	22.108 Orang

No	Perangkat Daerah	Program Kegiatan	Pagu	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	300.000.000	109.516 Orang
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	527.611.000	9.306 Orang
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	200.000.000	511 Orang
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.555.728.142	9.773 Orang
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	2.220.000.000	17.310 Orang
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	9.687.262.000	1 Dokumen
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	200.000.000	1 Dokumen
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	194.325.000	50 Orang
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	5.617.968.000	1 Dokumen
4.	DINAS PENDIDIKAN (DISDIK)		167.774.800.000	
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	57.614.070.000	232 Satuan Pendidikan
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	33.700.000.000	27.700 Unit
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	8.225.000.000	4.500 Peserta Didik

No	Perangkat Daerah	Program Kegiatan	Pagu	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	23.992.620.000	92 Satuan Pendidikan
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	28.425.000.000	11.500 Paket
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	1.500.000.000	11.650 Peserta Didik
		Pengelolaan Dana BOP PAUD	9.373.600.000	344 Satuan Pendidikan
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	1.500.000.000	2831 Peserta Didik
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	2.844.510.000	19 Satuan Pendidikan
		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	600.000.000	2.831 Peserta Didik
5.	DINAS KETAHANAN PANGAN (DISKEPANG)		500.000.000	
		Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	500.000.000	78 Ton
6.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN (DISPERINDAG)		5.000.000.000	
		Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5.000.000.000	1 Laporan
7.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (DISNAKERTRANS)		2.932.200.000	
		Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	2.932.200.000	14.500 Orang
8.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DPPKB)		1.408.800.000	

No	Perangkat Daerah	Program Kegiatan	Pagu	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	528.000.000	528 (Orang) TPK
		Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	580.800.000	176 (Tim) TPK
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	300.000.000	79 Organisasi
TOTAL			254.338.190.391	

BAB IV
RENCANA AKSI TAHUNAN PENANGGULANGAN
KEMISKINAN KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2025

4.1 Strategi dan Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025

Tabel 4.1 Strategi Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan 2025

No	Perangkat Daerah	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR)		83.206.000.000	
		Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku	2.000.000	1 Unit
		Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	1.000.000	1 KM
		Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	1.000.000	1 Titik
		Pembangunan Unit Air Baku	7.000.000.000	1 Unit
		Pembangunan Kanal Banjir	25.000.000.000	1 KM
		Pembangunan Tanggul Sungai	1.000.000	1 KM
		Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	195.000.000	0 titik
		Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	4.000.000.000	1 Unit
		Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	1.000.000	1 KM
		Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	1.000.000	1 KM
		Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak	5.000.000.000	1 KM
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1.000.000	1 KM
		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.000.000	200 KM

No	Perangkat Daerah	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	1.000.000	2 Bendung
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	1.000.000	2 Dokumen
		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	42.000.000.000	10 Liter/Detik
2.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (DINDIKBUD)		108.212.648.000	
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	22.260.000.000	40 Unit
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	36.427.000.000	26 Ruang
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.430.000.000	1 Unit
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	33.397.000.000	15 Ruang
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4.900.000.000	0 Unit
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.500.000.000	0 Ruang Kelas
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	-	0 Unit
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	2.898.648.000	15 Ruang
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	4.450.000.000	12 Ruang
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	950.000.000	4 Ruang
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	-	2 Ruang
3.	DINAS PERHUBUNGAN (DISHUB)		2.900.000.000	
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota	1.000.000.000	100 %

No	Perangkat Daerah	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
		Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	1.700.000.000	9 Unit
		Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	900.000.000	4 Unit
4.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN (DISPERKIM)		1.073.258.626.856	
		Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	200.000.000	1 Dokumen
		Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	200.000.000	50 Orang
		Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	6.000.000.000	100 Unit Rumah
		Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	4.000.000.000	34 Unit Rumah
		Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	481.916.766.856	0000 Dokumen
		Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	1.000.000.000	1 Dokumen
		Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	31.000.000.000	1 Ha
		Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	200.000.000	20 Orang
		Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1.009.900.000	1 Dokumen
		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	547.731.960.000	1 Lokasi
5.	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN (DTPHP)		8.200.000.000	

No	Perangkat Daerah	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	800.000.000	4 Unit
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	5.400.000.000	25 Unit
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	1.000.000.000	4 Unit
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	1.000.000.000	1 Unit
6.	DINAS KETAHANAN PANGAN (DISKEPANG)		61.000.000.000	
		Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	53.400.000.000	5 unit
		Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	500.000.000	1 Laporan
		Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	600.000.000	1 Dokumen
		Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	400.000.000	1 Dokumen
		Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	500.000.000	1 Dokumen
7.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		5.350.000.000	
		Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	150.000.000	12 Dokumen
		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	5.000.000.000	1 Dokumen
		Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang	200.000.000	2 Dokumen

No	Perangkat Daerah	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		
7.	KANTOR CAMAT SANGATTA UTARA		100.000.000	
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100.000.000	50 Keluarga
8.	KANTOR CAMAT BENGALON		100.000.000	
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100.000.000	50 Keluarga
9.	KANTOR CAMAT KALIORANG		38.420.000	
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	38.420.000	30 Keluarga
10.	KANTOR CAMAT MUARA WAHAU		32.884.000	
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	32.884.000	603 Keluarga
11.	KANTOR CAMAT KALIORANG		38.420.000	
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	38.420.000	30 Keluarga
12.	KANTOR CAMAT KONGBENG		78.935.500	
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan	78.935.500	200 Keluarga

No	Perangkat Daerah	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		
13.	KANTOR CAMAT BATU AMPAR		99.143.000	
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	99.143.000	100 Keluarga
14.	KANTOR CAMAT TELEN		117.216.000	
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	117.216.000	50 Keluarga
15.	KANTOR CAMAT BUSANG		109.054.201	
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	109.054.201	15 Keluarga
16.	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN		29.030.070	
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	81.295.000	100 Keluarga
17.	KANTOR CAMAT RANTAU PULUNG		81.295.000	
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	81.295.000	100 Keluarga
18.	KANTOR CAMAT KAUBUN		75.000.000	
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan	75.000.000	50 Keluarga

No	Perangkat Daerah	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		
19.	KANTOR CAMAT SANGKULIRANG		59.301.000	
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	59.301.000	30 Keluarga
20.	KANTOR CAMAT MUARA BENGKAL		125.000.000	
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	125.000.000	200 Keluarga
21.	KANTOR CAMAT LONG MESANGAT		49.150.000	
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	49.150.000	25 Keluarga
22.	KANTOR CAMAT KARANGAN		46.578.000	
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	46.578.000	1 Keluarga
23.	KANTOR CAMAT SANDARAN		34.920.000	
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	34.920.000	360 Keluarga
TOTAL			1.338.673.201.627	

Tabel 4.2 Strategi Meningkatkan Pendapatan 2025

No	Perangkat Daerah	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	DINAS SOSIAL (DINSOS)		176.260.600	
		Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT (Komunitas Adat Terpencil)	176.260.600	40 Keluarga
2.	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN (DTPHP)		1.750.000.000	
		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1.500.000.000	1 Laporan
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	250.000.000	200 Kelompok Tani Unit
3.	DINAS KETAHANAN PANGAN (DISKEPANG)		1.000.000.000	
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1.000.000.000	1 Laporan
4.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (DISNAKERTRANS)		5.564.000.000	
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	3.414.000.000	240 Orang
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	200.000.000	23 Lembaga
		Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	250.000.000	20 Orang
		Perluasan Kesempatan Kerja	1.700.000.000	550 Orang
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	3.414.000.000	240 Orang
5.	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH		3.130.324.630	
		Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	840.229.300	600 Unit Usaha
		Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya	2.290.095.330	300 Unit Usaha

No	Perangkat Daerah	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Manusia, serta Desain dan Teknologi		
6.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		1.000.000.000	
		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.000.000.000	1 Dokumen
7.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		199.999.690	
		Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	199.999.690	1 Dokumen
8.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		342.356.000	
		Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	342.356.000	50 Orang
9.	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI MANDIRI		2.900.000.000	
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	2.900.000.000	300 Orang
10.	KANTOR CAMAT MUARA ANCALONG		5.564.000.000	
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	-	100 Keluarga
11.	UPT BALAI BENIH IKAN KALIORANG		269.407.600	
		Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	269.407.600	
12.	UPT BALAI BENIH IKAN KALIORANG		145.360.000	
		Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	146.360.000	

No	Perangkat Daerah	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10.	KANTOR LURAH SINGA GEWEH		50.000.000	
		Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	50.000.000	
TOTAL			16.528.708.502	

Tabel 4.3 Strategi Mengurangi Beban Pengeluaran 2025

No	Perangkat Daerah	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	DINAS SOSIAL (DINSOS)		6.232.690.336	
		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	331.722.050	21 Orang
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	171.260.100	13 Lembaga
		Penyediaan Permakanan	199.967.900	30 Orang
		Penyediaan Sandang	19.926.000	40 orang
		Penyediaan Alat Bantu	49.629.850	15 Orang
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	201.955.000	30 Orang
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	98.673.000	50 Orang
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	50.073.000	25 Orang
		Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	11.020.000	20 Orang
		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	107.304.000	20 Orang
		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	11.020.000	20 Orang
		Pemberian Layanan Kedaruratan	149.929.000	25 orang
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	342.142.970	50 Orang
		Pemberian Layanan Rujukan	201.152.000	20 Orang
		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	22.040.000	10 Orang

No	Perangkat Daerah	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Pemberian Layanan Kedaruratan	22.040.000	10 Orang
		Penyediaan Permakanan	30.133.450	30 Orang
		Penyediaan Sandang	40.184.300	108 Orang
		Penyediaan Alat Bantu	39.695.560	23 Orang
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	11.712.460	10 Orang
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	50.000.000	25 Orang
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	50.000.000	25 Orang
		Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	16.530.000	25 Orang
		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	49.997.980	15 Orang
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	78.773.000	15 Orang
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	80.406.000	15 Orang
		Pemberian Layanan Rujukan	47.346.000	10 Orang
		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	999.529.000	60000 Orang
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	999.144.000	20000 Keluarga
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	999.999.610	1000 Keluarga
		Penyediaan Makanan	550.212.640	1000 Orang
		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	199.171.466	20 Unit
2.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)		450.000.000	
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	300.000.000	50 Orang

No	Perangkat Daerah	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)		
		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	50.000.000	20 Orang
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100.000.000	200 Orang
3.	DINAS KESEHATAN (DINKES)		76.779.705.915	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.000.000.000	8235 orang
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	800.000.000	7793 orang
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	800.000.000	7520 orang
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	800.000.000	35125 orang
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1.300.000.000	61445 orang
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	800.000.000	299094 orang
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	300.000.000	108563 orang
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	800.000.000	9226 orang
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	550.000.000	562 orang
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.300.000.000	9774 orang

No	Perangkat Daerah	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	2.000.000.000	17800 orang
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	300.000.000	1 Dokumen
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	11.018.250.000	1 Dokumen
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	3.064.867.000	1 Dokumen
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	51.946.588.915	1Dokumen
4.	DINAS PENDIDIKAN DAN BUDAYA (DINDIKBUD)		97.523.597.032	
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	15.000.000.000	5.500 Paket
		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	3.351.577.032	236 Satuan Pendidikan
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	22.300.000.000	65.898 Peserta Didik
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	9.500.000.000	3.000 peserta didik
		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	2.495.900.000	0 Satuan Pendidikan
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	29.876.120.000	0 Paket
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	3.600.000.000	14.500 Peserta Didik
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	10.000.000.000	2 Paket

No	Perangkat Daerah	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	1.400.000.000	5000 Peserta Didik
5.	DINAS KETAHANAN PANGAN (DISKEPANG)		1.550.000.000	
		Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	800.000.000	1 Keluarga
		Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	750.000.000	60 Ton
6.	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH (PPKUKM)		8.000.000.000	
		Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	8.000.000.000	8 Laporan
7.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (DISNAKERTRANS)		31.800.000.000	
		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	300.000.000	5 Laporan
		Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	31.500.000.000	115000 Orang
8.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DPPKB)		550.000.000	
		Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	550.000.000	5 Laporan
9.	KANTOR CAMAT MUARA ANCALONG		-	
		Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	-	100 Keluarga

No	Perangkat Daerah	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10.	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN		29.030.070	
		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	29.030.070	35 Keluarga
11.	KANTOR CAMAT MUARA BENGKAL		175.000.000	
		Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	175.000.000	500 Keluarga
12.	KANTOR LURAH SINGA GEWEH		50.000.000	
		Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50.000.000	
TOTAL			219.440.023.353	

Tabel 4. 4 RAT Penanggulangan Kemiskinan dari PT. KALTIM PRIMA COAL, 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN (IDR)	KETERANGAN
1,	Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bantuan paket sembako Hari Raya Idul Fitri	Kutai Timur	Pembagian paket sembako kepada 3900 penerima manfaat	916.500.000	Bantuan diberikan secara langsung ataupun tidak langsung melalui lembaga yang ditunjuk oleh perusahaan
2,	Penanganan Stunting	Kecamatan Sangatta Utara	Peningkatan kapasitas kader kesehatan (Posyandu, kader PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana), Petugas TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting), dll), serta penguatan kelembagaan	100.000.000	
			Bantuan sarana dan prasarana atau perlengkapan kesehatan di fasilitas kesehatan (Posyandu/Puskesmas)	300.000.000	
			Bantuan PMT (Pemberian Makanan Tambahan) untuk target lokus stunting atau status gizi kurang/buruk di masing-masing wilayah	100.000.000	
			Kegiatan pencegahan stunting dengan REMATRI (Remaja Putri) di SMP/SMA/SMK -> Pengetesan HB (Hemoglobin) dan pengadaan sirup zink/ tablet tambag darah; serta monitoring dan evaluasi	150.000.000	
		Kecamatan Sangatta Selatan	Peningkatan kapasitas kader kesehatan (Posyandu, kader PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana), Petugas TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting), dll), serta penguatan kelembagaan	100.000.000	
			Bantuan sarana dan prasarana atau perlengkapan kesehatan di fasilitas kesehatan (Posyandu/Puskesmas)	300.000.000	
			Bantuan PMT (Pemberian Makanan Tambahan) untuk target lokus stunting atau status gizi kurang/buruk di masing-masing wilayah	100.000.000	
			Kegiatan pencegahan stunting dengan REMATRI (Remaja Putri) di SMP/SMA/SMK -> Pengetesan HB (Hemoglobin) dan pengadaan sirup zink/ tablet tambag darah; serta monitoring dan evaluasi	150.000.000	
		Sepaso Barat, Bengalon	Pencegahan dan Penanganan Stunting	30.000.000	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN (IDR)	KETERANGAN
3,	Bantuan Modal Bagi UMKM				
	Bantuan modal bagi UMKM melalui Forum MSHCSR	Kutai Timur	Bantuan kepada 15 UMKM	500.000.000	
	Bantuan modal usaha untuk 15 pengusaha Kutai sangatta Level ultra mikro yang menjadi peserta program "Urang Sengata Berdaya"	sangatta Utara & Sangatta Selatan	15 peserta	75.000.000	bantuan diberikan langsung oleh KPC ke lembaga
	Bantuan modal usaha untuk pengusaha level ultra mikro yang menjadi peserta program "Kutimpreneur 2"	kutai timur	30 peserta	300.000.000	bantuan diberikan langsung oleh KPC melalui Koperasi Alumni
	Bantuan modal usaha untuk peserta program kolaborasi dengan Dewan Masjid Indonesia (DMI) cab Kutim	sangata utara	5 kelompok usaha masjid	75.000.000	bantuan diberikan langsung oleh
	Bantuan Modal bagi UMKM di Bangalon	Sekerat, Bangalon	Kelompok Nelayan dan Pertanian	70.000.000	
	Bantuan Modal bagi UMKM di Bangalon	Sekerat, Bangalon	UMKM	50.000.000	
	Bantuan Modal bagi UMKM di Bangalon	Sekerat, Bangalon	Kegiatan Pemberdayaan	400.000.000	
	Bantuan Modal bagi UMKM di Bangalon	Tepian Indah,	Pertanian	20.000.000	
	Bantuan Modal bagi UMKM di Bangalon	Tepian Indah,	Dukungan Kegiatan	220.000.000	
	Bantuan Modal bagi UMKM di Bangalon	Tepian Indah,	UMKM	50.000.000	
4,	Peningkatan Kapasitas Kelompok UMKM				
	Bantuan pelaksanaan event Lokal Market	Kutai Timur	Pelaksanaan event Lokal Market untuk UMKM	250.000.000	
	Bantuan pelaksanaan event Kutim Bisa	Kutai Timur	Pelaksanaan event Kutim Bisa	250.000.000	
	Bantuan pelatihan & pendampingan usaha untuk 15 pengusaha Kutai Sangata level ultra mikro yang menjadi peserta program "Urang Sengata Berdaya"	sangatta utara & Sangatta Selatan	15 peserta	80.390.000	bantuan diberikan langsung oleh KPC ke lembaga
	Bantuan pelatihan untuk peserta program kolaborasi dengan Dewan Masjid Indonesia (DMI) cab Kutim	Sangatta utara	5 kelompok usaha masjid	25.000.000	bantuan diberikan langsung oleh KPC melalui
	Peningkatan Kapasitas Kelompok UMKM Bangalon	Sepaso Barat, Bangalon	Kegiatan BUMDes	30.000.000	
	Peningkatan Kapasitas Kelompok UMKM Bangalon	Sepaso Selatan, Bangalon	UMKM	30.000.000	
	Peningkatan Kapasitas Kelompok UMKM Bangalon	Sepaso Selatan, Bangalon	Kegiatan Pertanian	45.000.000	
	Peningkatan Kapasitas Kelompok UMKM Bangalon	Sepaso Timur, Bangalon	Kegiatan PKK	25.000.000	
	Peningkatan Kapasitas Kelompok UMKM Bangalon	Sepaso Timur, Bangalon	Kegiatan Karang Taruna	10.000.000	
	Peningkatan Kapasitas Kelompok UMKM Bangalon	Sepaso Timur, Bangalon	Kegiatan Bumdes	25.000.000	
	Peningkatan Kapasitas Kelompok UMKM Bangalon	Sepaso Timur, Bangalon	Kegiatan Pertanian	30.000.000	
	Peningkatan Kapasitas Kelompok UMKM Bangalon	Sepaso Timur, Bangalon	Kegiatan UMKM	20.000.000	
	Peningkatan Kapasitas Kelompok UMKM Bangalon	Tepian Indah, Bangalon	BUMDES	150.000.000	
	Peningkatan Kapasitas Kelompok UMKM Bangalon	Sepaso, Bangalon	Pengelolaan Sampah	100.000.000	
	Peningkatan Kapasitas Kelompok UMKM Bangalon	Sepaso, Bangalon	Pertanian	50.000.000	
	Peningkatan Kapasitas Kelompok UMKM Bangalon	Sepaso, Bangalon	Dukungan Kegiatan Berbasis Masyarakat	150.000.000	
	Peningkatan Kapasitas Kelompok UMKM Bangalon	Sepaso, Bangalon	Bantuan Kegiatan Kepemudaan (Karang Taruna)	80.000.000	
	Peningkatan Kapasitas Kelompok UMKM Bangalon	Keraitan, Bangalon	Pertanian dan Perkebunan	350.000.000	
	Peningkatan Kapasitas Kelompok UMKM Bangalon	Keraitan, Bangalon	UMKM	20.000.000	
	Peningkatan Kapasitas Kelompok UMKM Bangalon	Tebangan Lembak, Bangalon	Dukungan Kegiatan Berbasis Masyarakat	30.000.000	
	Peningkatan Kapasitas Kelompok UMKM Bangalon	Tebangan Lembak, Bangalon	UMKM	40.000.000	
	Peningkatan Kapasitas Kelompok UMKM Bangalon	Tepian Langsung, Bangalon	Dukungan budidaya peternakan dan pertanian	273.000.000	
	Peningkatan Kapasitas Kelompok UMKM Bangalon	Tepian Langsung, Bangalon	Dukungan pembinaan karang taruna	50.000.000	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN (IDR)	KETERANGAN
5,	Pembangunan Sanitasi/ Jamban				
6,	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				
7,	Pembangunan Rumah Layak Huni				
	Bantuan Pembangunan 20 Rumah Layak Huni	Kutai Timur	20 unit Rumah Layak Huni	2.300.000.000	Program dari pemerintah
8,	Beasiswa Bagi Masyarakat Miskin				
9,	Bantuan Korban Bencana				
TOTAL				8.419.890.000	

Tabel 4.5 RAT Penanggulangan Kemiskinan dari BAZNAZ Kabupaten Kutai Timur, 2025

RENCANA KERJA PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN (PER TAHUN)	KETERANGAN
1.	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	Kutai Timur	168 Lansia Mustahik	Rp. 1.008.000.000	Bantuan Rutin Lansia
2.	Penanganan Stunting	Kutai Timur	200 Balita/Ibu Hamil Mustahik	Rp. 1.200.000.000	Bantuan Rutin Balita/Ibu Hamil Stunting
3.	Bantuan Modal bagi UMKM	Kutai Timur	250 Mustahik	Rp. 1.250.000.000	Kategori Bantuan Modal dan Pengembangan UMKM Mustahik
4.	Peningkatan Kapasitas Kelompok UMKM	Kutai Timur	-	-	-
5.	Pembangunan Sanitasi/Jamban	Kutai Timur	-	-	-
6.	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kutai Timur	-	-	-
7.	Pembangunan Rumah Layak Huni	Kutai Timur	40 Rumah	Rp. 1.600.000.000	Rp. 40.000.000/Rumah
8.	Beasiswa Bagi masyarakat Miskin	Kutai Timur	35 Mahasiswa dan 150 Pendidikan Dasar/Menengah/Diniyah	Rp. 1.724.000.000	<ul style="list-style-type: none"> • Beasiswa SEBI dan Mesir (1.074.000.000) • Stimulan (Rp. 650.000.000)
9.	Bantuan Korban Bencana	Kutai Timur	Pelaksanaan Program	Rp. 1.000.000.000	BAZNAS Tanggap Bencana

**Tabel 4. 6 RAT Penanggulangan Kemiskinan dari PT. TELADAN PRIMA
AGRO. Tbk, 2025**

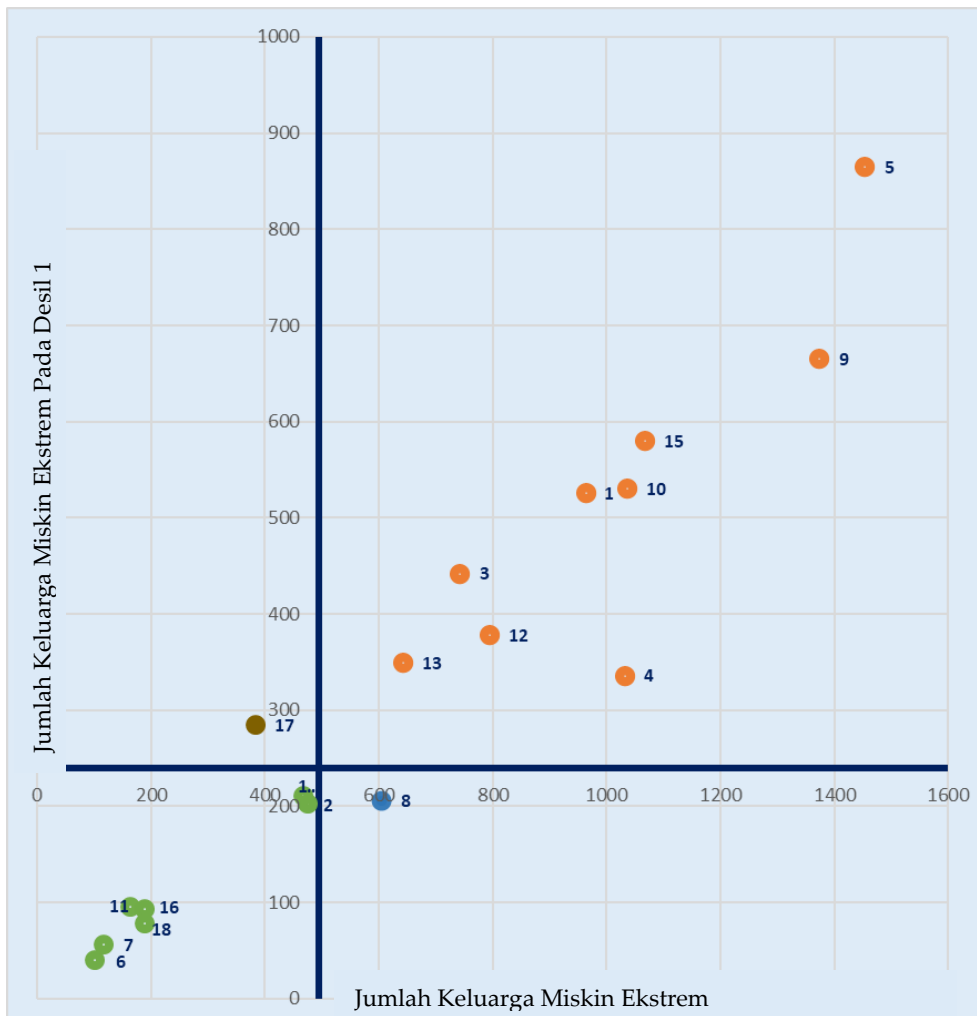
NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Bantuan Langsung Tunai (BLT)				
2.	Penanganan Stunting	Kec. Karang	10 Posyandu	41.184.000	Bantuan PMT
3.	Bantuan Modal Bagi UMKM	Kec. Kaubun	2 UKM Binaan	34.500.000	Keripik singkong, ketak dan rotan. Bantuan dalam bentuk sarana produksi dan kemasan
4.	Peningkatan Kapasitas Kelompok UMKM	Kec.Kaubun	1 Kelompok Tani	21.440.000	Pelatihan dan penyuluhan kel.Tani
5.	Pembangunan Sanitasi/Jamban				
6.	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				
7.	Pembangunan Rumah Layak Huni				
8.	Beasiswa Bagi Masyarakat Miskin	Kec. Karang Kec. Kaubun Kec. Muara Bengkal Kec. Long Mesangat Kec. Muara Ancalong	74 Anak	222.000.000	Beasiswa tambahan belajar sebesar 1.500.000,- per semester per anak.
9.	Bantuan Korban Bencana				

4.2 Lokasi prioritas Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025

Penentuan lokasi prioritas program penanggulangan kemiskinan Kabupaten Kutai Timur tahun 2025 yaitu dengan menggunakan analisis *scatter plot* sederhana, lokasi yang dimaksud disajikan dalam tingkat kecamatan. Pada *scatter plot* yang akan dibuat, untuk nama kecamatannya disajikan dalam bentuk kode sebagai berikut:

KODE	NAMA KECAMATAN
(1)	(2)
1	Muara Ancalong
2	Muara Wahau
3	Muara Bengkal
4	Sangatta Utara
5	Sangkulirang
6	Busang
7	Telen
8	Kongbeng
9	Bengalon
10	Kaliorang
11	Sandaran
12	Sangatta Selatan
13	Teluk Pandan
14	Rantau Pulung
15	Kaubun
16	Karangan
17	Batu Ampar
18	Long Mesangat

a. Bidang Kemiskinan Konsumsi



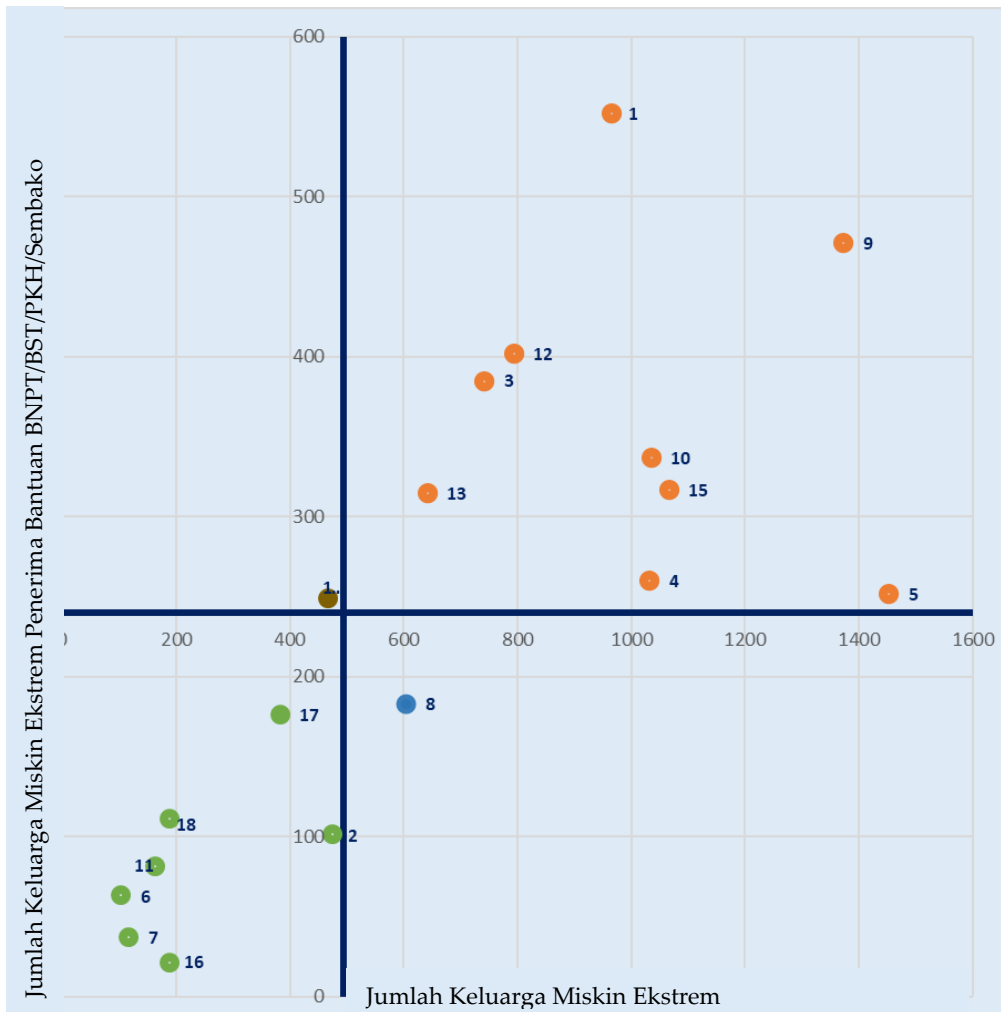
Gambar 4. 1 Bidang Kemiskinan Konsumsi (Jumlah Keluarga Miskin Ekstrem dan Jumlah Keluarga Miskin Ekstrem Desil 1)

Sumber: P3KE 2022

Penentuan lokasi program prioritas pada bidang kemiskinan konsumsi dengan pendekatan jumlah keluarga miskin ekstrem dan jumlah keluarga miskin ekstrem yang berada pada tingkat kesejahteraan terendah (Desil 1). Berdasarkan gambar 4.1, berikut kecamatan dengan prioritas tinggi:

1. Sangkulirang
2. Bangalon
3. Kaubun
4. Kaliorang
5. Sangatta Utara
6. Muara Ancalong
7. Sangatta Selatan

8. Muara Bengkal
9. Teluk Pandan



Gambar 4.2 Bidang Kemiskinan Konsumsi (Jumlah Keluarga Miskin Ekstrem dan Jumlah Keluarga Miskin Ekstrem Penerima Bantuan BNPT/BST/PKH/Sembako)

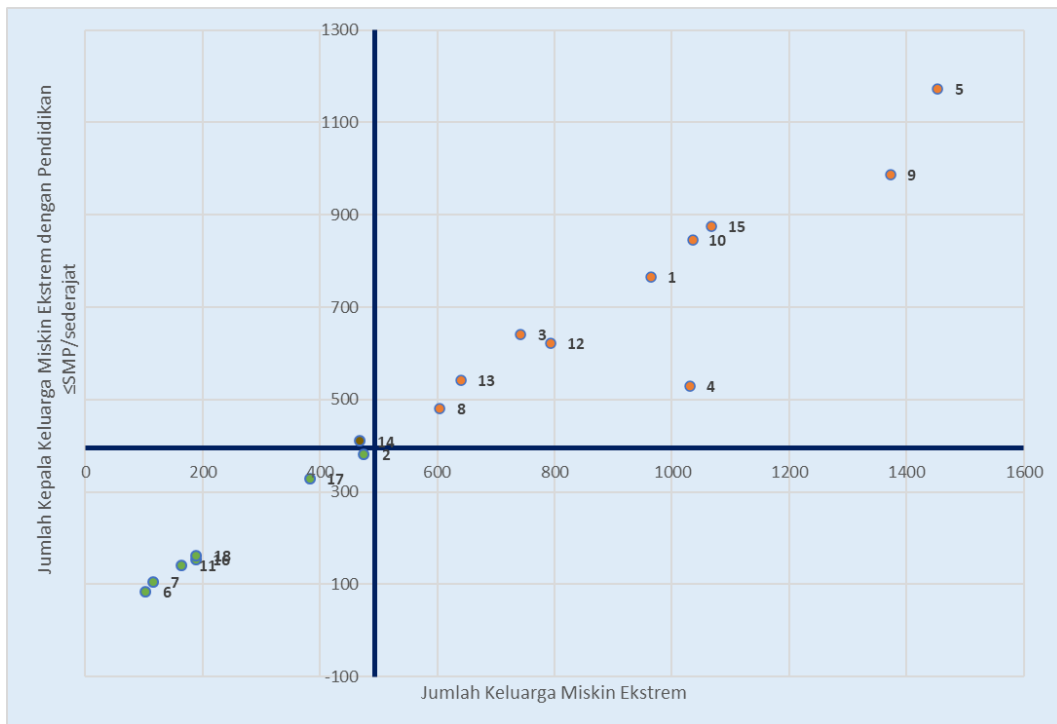
Sumber: P3KE 2022

Penentuan lokasi program prioritas pada bidang kemiskinan konsumsi dengan pendekatan jumlah keluarga miskin ekstrem dan jumlah keluarga miskin ekstrem penerima bantuan BNPT/BST/PKH/sembako. Berdasarkan gambar 4.2, berikut kecamatan dengan prioritas tinggi:

1. Sangkulirang
2. Bengalon
3. Kaubun
4. Kaliorang

5. Sangatta Utara
6. Muara Ancalong
7. Sangatta Selatan
8. Muara Bengkal
9. Teluk Pandan

b. Bidang Pendidikan



Gambar 4.3 Bidang Pendidikan (Jumlah Keluarga Miskin Ekstrem dan Jumlah Kepala Keluarga Miskin Ekstrem dengan Pendidikan ≤ SMP/serajat)

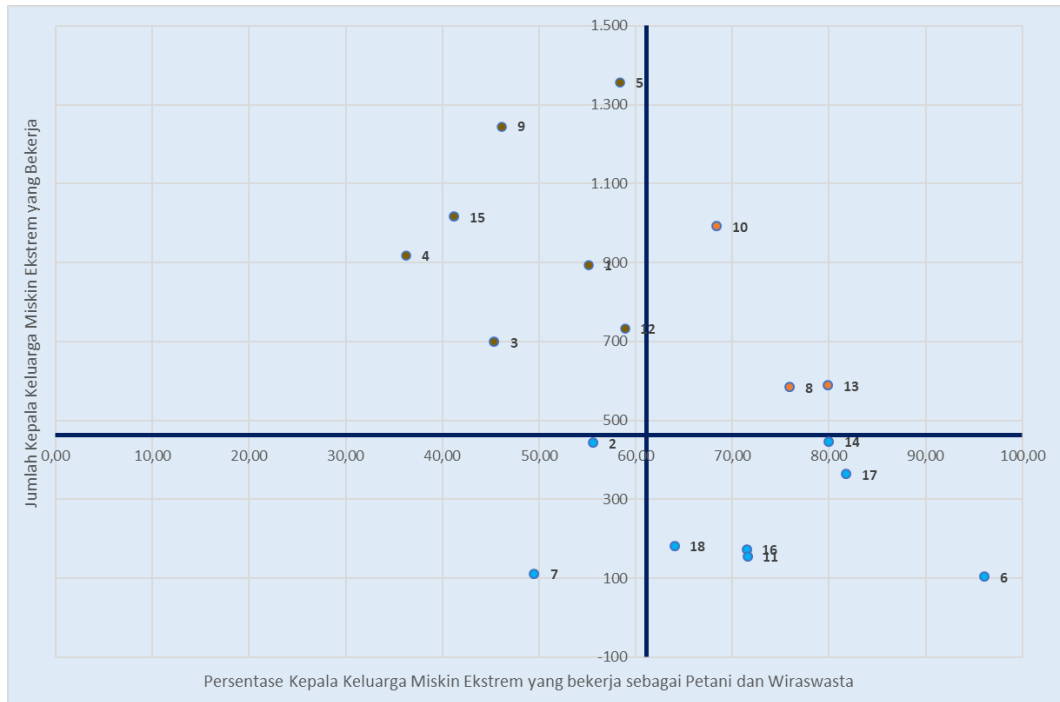
Sumber: P3KE 2022

Penentuan lokasi program prioritas pada bidang pendidikan dengan pendekatan jumlah keluarga miskin ekstrem dan jumlah kepala keluarga miskin ekstrem dengan pendidikan \leq SMP/serajat. Berdasarkan gambar 4.3, berikut kecamatan dengan prioritas tinggi:

1. Sangkulirang
2. Bengalon
3. Kaubun
4. Kaliorang
5. Sangatta Utara
6. Muara Ancalong

7. Sangatta Selatan
8. Muara Bengkal
9. Teluk Pandan
10. Kongbeng

c. Bidang Ketenagakerjaan



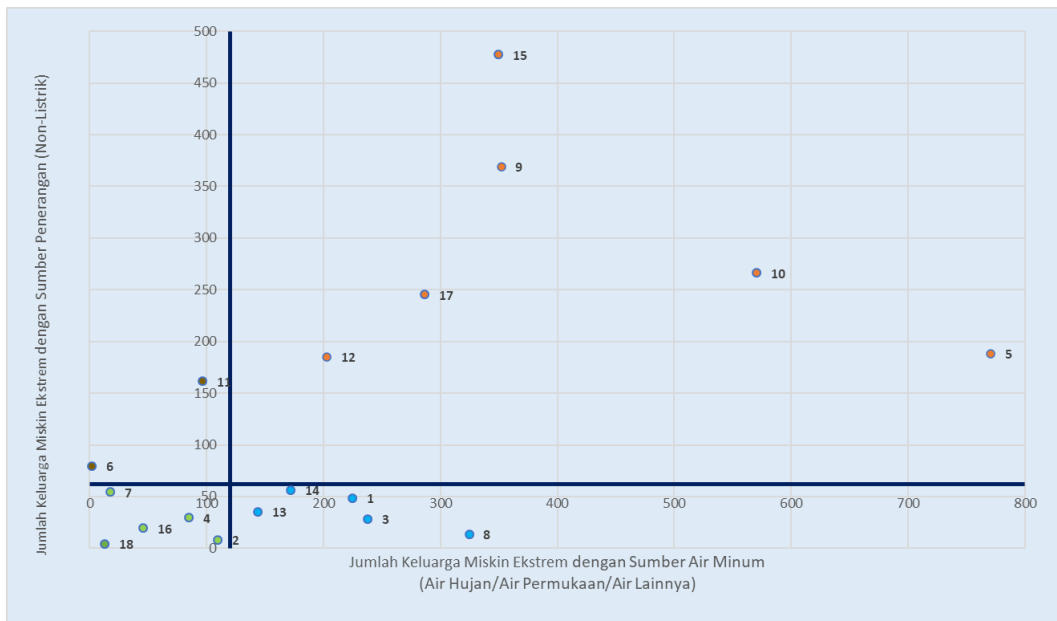
Gambar 4. 4 Bidang Pendidikan (Persentase Kepala Keluarga Miskin Ekstrem yang bekerja sebagai Petani dan Wiraswasta dengan Jumlah Kepala Keluarga Miskin Ekstrem yang Bekerja)

Sumber: P3KE 2022

Penentuan lokasi program prioritas pada bidang ketenagakerjaan dengan pendekatan persentase kepala keluarga miskin ekstrem yang bekerja sebagai petani dengan tingkat penangguran kepala keluarga miskin ekstrem. Berdasarkan gambar 4.4, berikut kecamatan dengan prioritas tinggi:

1. Teluk Pandan
2. Kongbeng
3. Kaliorang

d. Bidang Infrastruktur Dasar



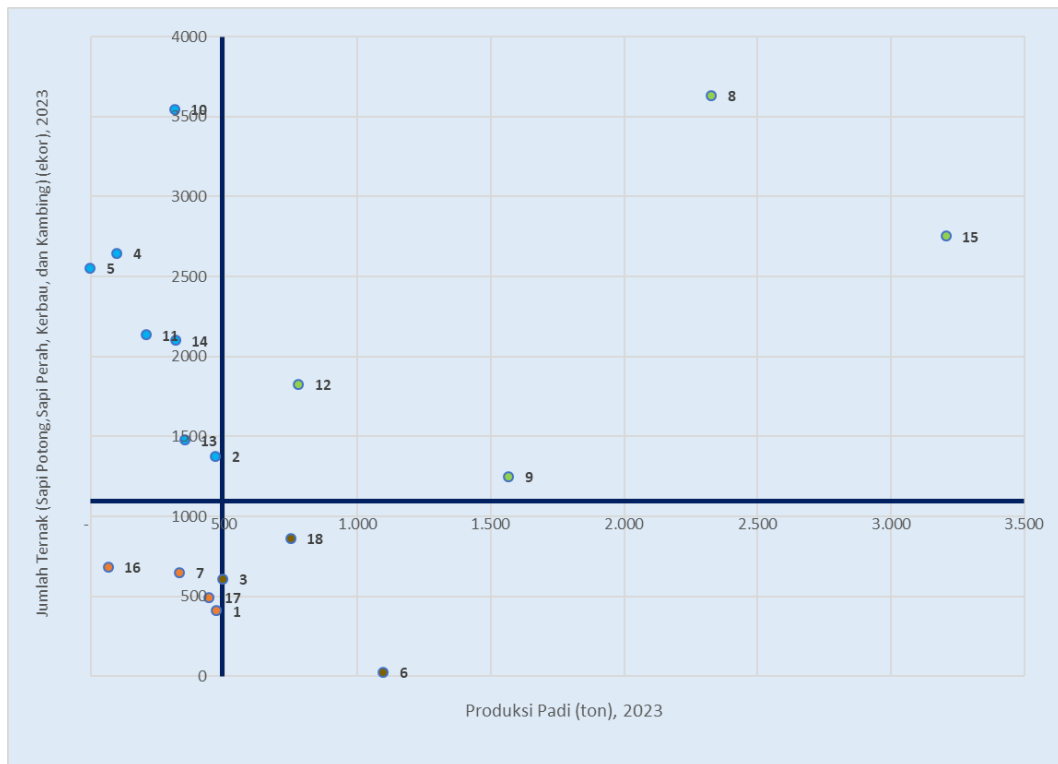
Gambar 4.5 Bidang Infrastruktur (Jumlah Keluarga Miskin Ekstrem dengan Sumber Air Minum (Air Hujan/Air Permukaan/Air Lainnya) dan Jumlah Keluarga Miskin Ekstrem dengan Sumber Penerangan (Non-Listrik))

Sumber: P3KE 2022

Penentuan lokasi program prioritas pada bidang infrastruktur dasar dengan pendekatan jumlah keluarga miskin ekstrem dengan sumber air minum (air hujan/air permukaan/air lainnya) dan jumlah keluarga miskin ekstrem dengan sumber penerangan (non-listrik). Berdasarkan gambar 4.5, berikut kecamatan dengan prioritas tinggi:

1. Sangkulirang
2. Kaliorang
3. Kaubun
4. Bengalon
5. Batu Ampar
6. Sangatta Selatan

e. Bidang Ketahanan Pangan



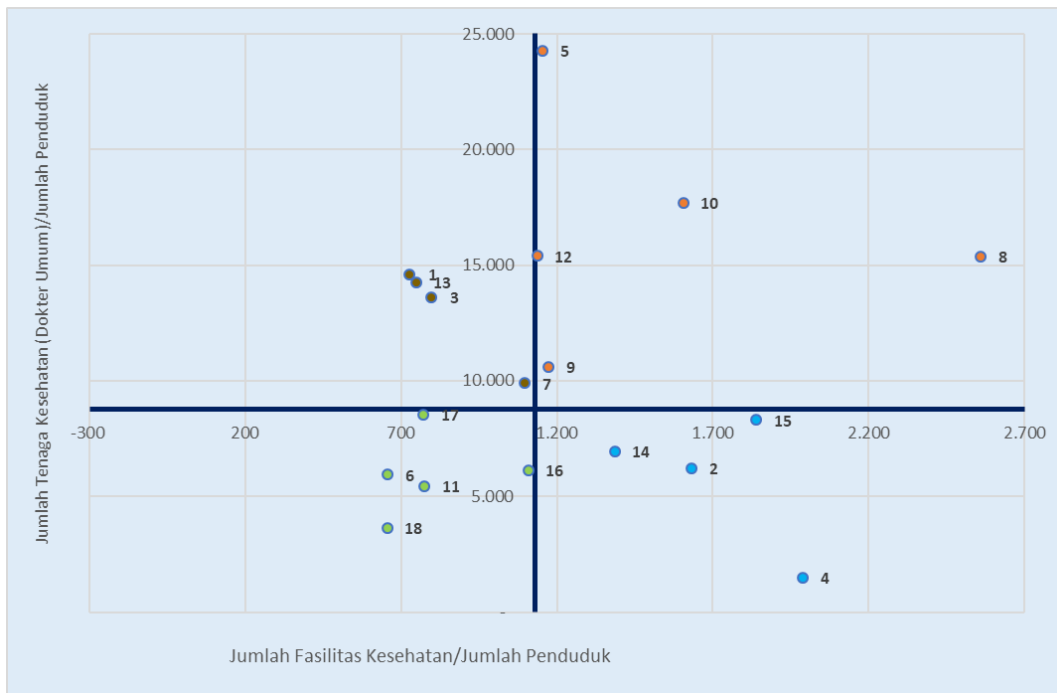
Gambar 4. 6 Bidang Ketahanan Pangan (Produksi Padi (ha), 2023 dan Jumlah Ternak (Sapi Potong, Sapi Perah, Kerbau, dan Kambing) (ekor), 2023)

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
Kabupaten Kutai Timur

Penentuan lokasi program prioritas pada bidang infrastruktur dasar dengan pendekatan produksi padi (ha), 2023 (data diolah) dan jumlah ternak (sapi potong, sapi perah, kerbau, dan kambing) (ekor). Berdasarkan gambar 4.6, berikut kecamatan dengan prioritas tinggi:

1. Karangan
2. Telen
3. Batu Ampar
4. Muara Ancalong

f. Bidang Kesehatan



Gambar 4. 7 Bidang Kesehatan (Jumlah Fasilitas Kesehatan/Jumlah Penduduk dan Jumlah Tenaga Kesehatan (Dokter Umum)/Jumlah Penduduk)

Sumber: Dinas Kesehatan Kab.Kutai Timur dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur

Penentuan lokasi program prioritas pada bidang kesehatan dengan pendekatan jumlah fasilitas kesehatan/jumlah penduduk dan jumlah tenaga kesehatan (dokter umum)/jumlah penduduk. Berdasarkan gambar 4.7, berikut kecamatan dengan prioritas tinggi:

1. Kongbeng
2. Kaliorang
3. Bengalon
4. Sangatta Selatan

Kecamatan Sangkulirang tidak dimasukkan karena sudah terdapat rumah sakit.

g. Bidang Kemiskinan Ekstrem

Penentuan lokasi program prioritas pada bidang kemiskinan ekstrem dengan pendekatan jumlah Proporsi Desil 1 Pada jumlah keluarga miskin ekstrem. Berdasarkan Tabel 4.7 terdapat 8 kecamatan dengan proporsi di atas rata-rata yaitu 49,49, berikut urutan kecamatan dari prioritas tertinggi:

Tabel 4.7 Bidang Kemiskinan Ekstrem (Proporsi Desil 1 Pada Jumlah Keluarga Miskin Ekstrem)

No.	Nama Kecamatan	Proporsi Desil 1 Pada Jumlah Keluarga Miskin Ekstrem
(1)	(2)	(3)
1.	Batu Ampar	73,96
2.	Muara Bengkal	59,57
3.	Sangkulirang	59,53
4.	Sandaran	57,58
5.	Muara Ancalong	54,46
6.	Kaubun	54,31
7.	Teluk Pandan	54,29
8.	Kaliorang	51,21
9.	Karangan	49,21
10.	Bengalon	48,47
11.	Telen	47,86
12.	Sangatta Selatan	47,67
13.	Rantau Pulung	44,78
14.	Muara Wahau	42,44
15.	Long Mesangat	41,05
16.	Busang	37,86
17.	Kongbeng	34,11
18.	Sangatta Utara	32,43

Sumber: P3KE 2022

Berdasarkan analisis yang dilakukan, berikut urutan kecamatan dengan prioritas tinggi untuk penanggulangan kemiskinan yaitu:

1. Sangkulirang
2. Bengalon
3. Kaliorang
4. Kaubun
5. Sangatta Utara
6. Muara Ancalong
7. Sangatta Selatan
8. Muara Bengkal
9. Teluk Pandan
10. Batu Ampar
11. Kongbeng
12. Karang
13. Long Mesangat
14. Sandaran

Tabel 4. 8 Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Kutai Timur

MISI	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	TARGET CAPAIAN 2025
Misi 1: Mewujudkan Masyarakat yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, dan Bersatu	Tujuan 1: Menata dan Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan mendorong kehidupan masyarakat (SDM) yang berakhlak mulia, berbudaya dan bersatu (M1.T1)	Indek Pembangunan Manusia (IPM)	76.18
	Sasaran 1: Meningkatnya taraf hidup masyarakat yang sejahtera (M1.T1.S1)	1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5.44
		2. Tingkat Kemiskinan	9.43

MISI	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	TARGET CAPAIAN 2025	
		3. Persentase PAD terhadap pendapatan	7,14	
	Sasaran 2: Meningkatnya taraf Pendidikan masyarakat (M1.T1.S2)	4. Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,20	
		5. Rata - Rata Lama Sekolah	9,55	
	Sasaran 3: Meningkatnya derajat kesehatan (M1.T1.S3)	6. Angka Harapan Hidup	77,45	
	Sasaran 4: Terwujudnya SDM yang beriman, berakhlak mulia dan Berbudaya (M1.T1.S4)	7. Persentase Sekolah yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	➤ SD= 100 ➤ SMP=96,55	
		8. Penyelenggaraan Festival seni dan budaya	6	
		9. Penyelenggaraan Festival keagamaan	1	
	Misi 2: Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Masyarakat berbasis Sektor Pertanian	Tujuan 2: Menata Daya Saing Ekonomi Masyarakat berbasis Sektor Pertanian/ Perkebunan/ Perikanan (M2.T1)	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	10.41
		Sasaran 5: Peningkatan kegiatan perekonomian berbasis sektor pertanian/ perkebunan/ perikanan (M2.T1.S1)	10. Ketersediaan Pangan Utama	45.66
11. Produksi sektor pertanian			50,630	
12. Produksi sektor perkebunan			8,456,662	
		13. Produksi perikanan	8,086.36	
Sasaran 6: Meningkatnya Pendapatan Petani (M2.T1.S2)		14. Nilai Tukar Petani (NTP)	109,64	

MISI	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	TARGET CAPAIAN 2025
	Tujuan 3: Menata Peran penunjang daya saing ekonomi masyarakat (M2.T2)	Laju Pertumbuhan Ekonomi	2,19
	Sasaran 7: Meningkatnya Kemampuan Perekonomian di Daerah (M2.T2.S1)	15. Pertumbuhan Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM)	1.733
		16. Investor berskala nasional (PMDN/PMA)	836
Misi 3 : Mewujudkan Pelayanan Dasar Masyarakat Secara Proporsional dan Merata	Tujuan 4: Menata semua layanan kebutuhan infrastruktur dasar dan Ekonomi Bagi Masyarakat Secara Proporsional dan Merata (M3.T1)	Indek Pembangunan Desa (IPD)	72,93
		Indeks Gini	0.349
	Sasaran 8: Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah (M3.T1.S1)	17. Persentase jalan Kabupaten kondisi Mantap	54.21
		18. Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	31%
	Sasaran 9: Meningkatnya Infrastruktur Fasilitas Perumahan/ permukiman) (M3.T1.S2)	19. Capaian Akses Air Minum Layak	53,95
		20. Persentase Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah Domestik	77,38 (aman 2,6%)
		21. Persentase Infrastruktur Pengelolaan Sampah Perkotaan	93,08

MISI	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	TARGET CAPAIAN 2025
		22. Tingkat Waktu Tanggap (Time Respon Limit) Daerah Layanan Wilayah Manajemn Kebakaran (WMK)	98,83
		23. Berkurangnya jumlah unit RTLH	0.24942
		24. Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	42,35 % (6 Lokasi BA FGD Review SK Kumuh 2021)
	Sasaran 10: Meningkatnya Infrastruktur Teknologi dan Informasi (M3.T1.S3)	25. Cakupan Layanan Telekomunikasi	85.48
	Sasaran 11: Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan (M3.T1.S4)	26. Rasio ketersediaan SD/ MI per penduduk	56,78
		27. Rasio ketersediaan SMP/ MTS per penduduk	53,46
	Sasaran 12: Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan (M3.T1.S5)	28. Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	0,51
		29. Rasio rumah sakit per satuan penduduk	0,02
	Sasaran 13: Meningkatnya Sarana dan Infrastuktur Pendukung Ekonomi (M3.T1.S6)	30. Jumlah pasar	16

MISI	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	TARGET CAPAIAN 2025
Misi 4 : Mewujudkan Pemerintahan yang partisipatif berbasis Penegakan Hukum dan Teknologi Informasi	Tujuan 5: Menata Kelola pemerintahan yang bersih, Efektif, Transparan dan Akuntabel berbasis Elektronik (M4.T1)	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Baik
	Sasaran 14: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan (M4.T1.S1)	31. Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP
		32. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	60
		33. Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	98,00
		34. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	50,00
	Tujuan 6: Menata kualitas layanan public yang berbasis interoperabilitas (M4.T2)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75,95
Sasaran 15: Meningkatnya kualitas layanan public yang berbasis interoperabilitas dalam pengembangan wilayah (M4.T2.S1)	35. Persentase Perangkat Daerah yang terkoneksi dengan jaringan fiber optik	62.86	
Misi 5 : Mewujudkan Sinergitas Pengembangan Wilayah dan Integrasi Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	Tujuan 7: Menata dan Mensinergikan Pembangunan yang terintegrasi agar berfungsi optimal (M5.T1)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71.47
	Sasaran 16: Meningkatnya Sinergitas proses Pengembangan wilayah yang Terintegrasi dan berwawasan lingkungan (M5.T1.S1)	36. Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	77.60
	Tujuan 8: Menata dan memanfaatkan ruang secara berkelanjutan (M5.T2)	Ketaatan terhadap RTRW	100

MISI	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	TARGET CAPAIAN 2025
	Sasaran 17: Meningkatnya penyelenggaraan ruang (M5.T2.S1)	Kualitas penataan	37. Jumlah Perkada RDTR 2

Tabel 4. 9 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
MISI 1: "MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERAKHLAK MULIA, BERBUDAYA DAN BERSATU"			
Menata dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan mendorong kehidupan masyarakat (SDM) yang berakhlak mulia, berbudaya dan bersatu	Meningkatnya taraf hidup masyarakat yang sejahtera	Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan dan Pengangguran	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan ketrampilan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. • Peningkatan Pendapatan Per-Kapita • Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa • Penguatan Daya Beli Masyarakat akibat Bencana Sosial • Enclave TNK untuk warga Kec Sangatta Selatan dan Teluk Pandan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Terwujudnya SDM yang beriman, berakhlak mulia dan Berbudaya	Meningkatkan Pengamalan Nilai Nilai Budaya dan Keagamaan di Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Pengamalan • Nilai-Nilai Agama dan Budaya Di Lingkungan Pendidikan sebagai Muatan Lokal • Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemuka Agama/ Tokoh Adat • Penyelenggaraan festival agama, seni dan budaya • Pelestarian benda, situs dan cagar budaya
MISI 2: "MEWUJUDKAN DAYA SAING EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS SEKTOR PERTANIAN"			
Menata Daya Saing Ekonomi Masyarakat berbasis Sektor Pertanian/ Perkebunan/ Perikanan	Peningkatan kegiatan perekonomian berbasis sektor pertanian/ perkebunan/ perikanan	Penguatan Cadangan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Ketahanan dan Keamanan Pangan • Peningkatan Diversifikasi Pangan
		Peningkatan Pertumbuhan ekonomi sektor Pertanian/Perkebunan /Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi pertanian/perkebunan/ perikanan • Peningkatan produksi pertanian/perkebunan/ perikanan Pengembangan perikanan tangkap • Pengembangan budidaya pertanian/perkebunan/ perikanan Program peternakan rakyat mandiri • Program replanting kebun kelapa sawit mandiri. • Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan
	Meningkatnya Pendapatan Petani	Peningkatan Sumber Daya Sarana dan Prasarana Petani	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Keterampilan Petani • Peningkatan Produktivitas Lahan
			<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan Teknologi Tepat Guna Pertanian secara bertahap melalui kegiatan peduli Desa.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan melakukan pengawasan sumber-sumber penerimaan daerah
	Meningkatnya taraf Pendidikan masyarakat	Peningkatan taraf pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Percepatan wajib belajar 9 tahun bagi anak dari masyarakat yang tidak mampu melalui BOSDA dan Beasiswa Kutim Tuntas Pemberian Beasiswa bagi masyarakat yang tidak mampu • Peningkatan kualitas Pendidik dan Tenaga Pendidik secara merata • Penguatan kelembagaan sekolah melalui peningkatan akreditasi • Pemberian bantuan seragam dan buku sekolah • Pemberian seragam bagi guru negeri dan swasta • Pemberian insentif bagi guru dan tenaga kependidikan
	Meningkatnya derajat kesehatan	Peningkatan derajat kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan dan Peningkatan Kualitas Tenaga Kesehatan • Secara Merata
			<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas Pelayanan Medis dan Obat-Obatan untuk Sarana Pelayanan Kesehatan • Optimalisasi Jaminan Kesehatan Masyarakat (BPJS) • Peningkatan insentif tenaga kesehatan • Pemberian secara gratis biaya persalinan bagi keluarga tidak mampu

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani. • Pengadaan benih dan bibit bagi petani. • Menjaga ketersediaan pupuk dan kestabilan harga hasil petani.
Menata Peran penunjang daya saing ekonomi masyarakat	Meningkatnya Kemampuan Perekonomiandi Daerah	Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Peningkatan Kualitas kelembagaan koperasi
		Peningkatan Pengembangan Pariwisata, Kewirausahaan, Usaha Kecil Menengah dan ekonomi kreatif	<ul style="list-style-type: none"> • Penciptaan Iklim Usaha UMKM/IKM yang kondusif • Pengembangan Kepariwisata di Daerah • Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Kelompok Sadar Wisata • Pemberian bantuan UMKM dan pelatihan keterampilan. • Membangun UKM Center. • Membangun fasilitas dan pengembangan wisata goa, hutan, goa lautan dan gunung.
		Meningkatkan investasi yang berbasis potensi Sumber daya Lokal	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan investasi di daerah. • Persiapan Sail Sangkulirang . • Penetapan regulasi yang mendukung penyerapan tenaga kerja. • Pembuatan BLK Mandiri. • Penyerapan 50.000 tenaga kerja. • Peningkatan perlindungan buruh.
MISI 3: "MEWUJUDKAN PELAYANAN DASAR BAGI MASYARAKAT SECARA PROPORSIONAL DAN MERATA"			
Menata semua layanan kebutuhan infrastruktur dasar dan Ekonomi Bagi Masyarakat Secara	Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah	Peningkatan Sarana Prasarana Transportasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan/ Peningkatan Jalan dan Jembatan • Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Proporsional dan Merata			<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Infrastruktur Dengan Skema Multi Years
	Meningkat-nya Infrastruktur Fasilitas Perumahan/ permukiman)	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> Pencapaian Akses Air Minum Layak dan Berkelanjutan Pemenuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Penyediaan Rumah Layak Huni Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Antisipasi Kebencanaan Pemberian Bantuan Program 50 JT Per-RT Per-Tahun.
	Meningkat-nya Infrastruktur Teknologi dan Informasi)	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Teknologi dan Informasi	Tersedianya jaringan internet di setiap desa Peningkatan e-Government di Pemerintahan Daerah
	Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Sekolah
	Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan	Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Puskesmas dan Jaringannya. Pembangunan Rumah sakit di wilayah hulu.
	Meningkatnya Sarana dan Infrastruktur Pendukung Ekonomi	Percepatan Integrasi Pembangunan Ekonomi Desa	Peningkatan Jumlah Pasar
MISI 4 : "MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG PARTISIPATIF BERBASIS PENEGAKAN HUKUM DAN TEKNOLOGI INFORMASI"			
Menata Kelola pemerintahan yang bersih, Efektif, Transparan dan Akuntabel berbasis Elektronik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Peningkatan Efisiensi pada Berbagai Pelayanan Publik berbasis Elektronik/	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Indeks Kepuasan masyarakat terhadap efektivitas kebijakan. layanan Evaluasi capaian

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Teknologi Informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan akuntabilitas Public kapasitas pemerintahan (capacity building). • Peningkatan Kecepatan dan Akurasi Data Kutai Timur. • Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan .
			<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan penelitian dan inovasi daerah • Implementasi 8 Area Perubahan • Penyusunan RPJMD dan RKPD Secara Sistematis dan Terstruktur • Terbukanya akses informasi public
		Peningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan peluang bagi pegawai dalam pendidikan, ketrampilan dan keahlian secara optima. • Implementasi 8 Area Perubahan • Penguatan Merit System • Revitalisasi Struktur organisasi yang lincah dan beradaptasi dengan lingkungan perubahan. • Kampanye Program Keluarga Berencana
Menata kualitas layanan publik yang berbasis interoperabilitas	Meningkatnya kualitas layanan public yang berbasis interoperabilitas dalam pembangunan wilayah	Peningkatan kemampuan system dan aplikasi antar instansi terkait untuksaling berkomunikasi dalam menghasilkan data dan layanan	Peningkatan e-Government di Pemerintahan Daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
MISI 5 : "MEWUJUDKAN SINERGITAS PENGEMBANGAN WILAYAH DAN INTEGRASI PEMBANGUNAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN"			
Menata dan Mensinergikan Pembangunan yang terintegrasi agar berfungsi optimal	Meningkatnya Sinergitas proses Pengembangan wilayah yang Terintegrasi dan berwawasan lingkungan	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kualitas pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan • Peningkatan kualitas layanan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dalam menunjang sektor pariwisata. • Peningkatan Pengelolaan Sampah.
Menata dan memanfaatkan ruang secara berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Peningkatan Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kuantitas dan kualitas detail perencanaan ruang • Peningkatan Pengendalian pemanfaatan ruang

BAB V

PENUTUP

Kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat kompleks dan juga merupakan permasalahan nasional yang menjadi prioritas pembangunan baik di tingkat pusat maupun di daerah. Oleh Karena itu pengentasan kemiskinan menjadi prioritas pembangunan dan harus dilakukan secara sistematis, terfokus, terencana dan terkoordinasi dengan baik. Kemiskinan juga telah menjadi permasalahan global yang secara khusus tertuang dalam tujuan SDG's. Penanganan masalah kemiskinan merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan pemerintah daerah serta seluruh pemangku kepentingan yang bersinergi secara efektif sehingga penanganannya dilakukan secara lintas sektor dan menjadi tanggungjawab multipihak, serta terkoordinasi dengan baik.

Kemiskinan di Kabupaten Kutai Timur dapat dikurangi atau dapat ditekan melalui stimulus pemberian program, baik program dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah sendiri. Penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang tertuang dalam dokumen Rencana Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur tahun 2021-2026, sehingga setiap sektor secara bersama menempatkan upaya penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas yang berdampak pada alokasi anggaran yang disusun oleh Perangkat Daerah terkait.

Capaian kinerja penanggulangan kemiskinan dapat diukur dengan melihat efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat miskin, pengembangan diversifikasi usaha keluarga miskin, efektivitas program pengembangan ekonomi produktif, perluasan kesempatan kerja bagi warga miskin, serta pola pemanfaatan program pengentasan kemiskinan. Sehingga dapat disusun program strategis dan langkah-langkah pembinaan yang terpadu, berkesinambungan dan bersifat kontekstual.



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR**